



Surga yang Hilang?

**Bagaimana Pertambangan Nikel
Mengancam Masa Depan Salah Satu
Kawasan Konservasi Paling Penting
di Dunia**

GREENPEACE

📍 Pulau Kawe, 04/05/25

Dalam laporan ini, penyebutan 'Greenpeace' harus dibaca sebagai rujukan kepada Greenpeace Indonesia, kecuali dinyatakan sebaliknya.

Juni 2025

Diterbitkan oleh Greenpeace Indonesia

Jl. HOS. Cokroaminoto No. 19

RT 1 / RW 2 Gondangdia, Kecamatan Menteng

Jakarta Pusat, Indonesia

Foto sampul depan:

Sedimen terlihat jelas di dekat operasi penambangan nikel di Pulau Kawe, Raja Ampat, mengubah warna air di salah satu wilayah laut Indonesia yang paling kaya akan keanekaragaman hayati. Pulau Kawe terletak di dalam kawasan Geopark yang ditetapkan UNESCO (04/05/25). © Alif R Noudy Korua/Greenpeace

Temuan-temuan Greenpeace dalam angka

Jumlah total izin pertambangan nikel yang masih aktif, telah dibatalkan, atau tidak berlaku lagi di seantero Raja Ampat	16
Jumlah izin tersebut yang sebagian atau seluruh areanya berada di dalam Geopark UNESCO	12
Jumlah izin tersebut yang ada dalam kawasan konservasi atau hutan lindung	10
Jumlah izin pertambangan nikel yang aktif di Raja Ampat	5
Jumlah izin pertambangan nikel aktif di wilayah yang secara hukum diklasifikasikan sebagai 'pulau-pulau kecil'	4
Jumlah izin pertambangan nikel yang diaktifkan atau diterbitkan kembali sepanjang tahun 2025	2
Jumlah permohonan pengadilan yang saat ini diajukan oleh perusahaan untuk mengaktifkan atau menerbitkan kembali izin pertambangan nikel di Raja Ampat	3
Jumlah izin pertambangan nikel aktif yang digugat oleh Kementerian ESDM	1
Jumlah rencana pembangunan smelter baru di Sorong, dekat Raja Ampat (satu nikel, satu baja)	2

Daftar Isi

Ringkasan	3
Pentingnya Raja Ampat	6
Jumlah dan Dampak terhadap Pariwisata	9
Pertumbuhan dan Dampak Penambangan Nikel di Seluruh Indonesia	11
Penambangan Nikel Aktif di Raja Ampat	13
Pulau Manuran	15
Pulau Gag	18
Orang yang Terpapar Secara Politis (Politically Exposed Persons)	21
Kawe Island	22
Orang yang Terpapar secara Politis (Politically Exposed Persons)	25
Pulau Manyafun dan Pulau Batang Pele	27
Pulau Waigeo (PT Nurham)	31
Izin-izin yang telah ditangguhkan, dapat diperpanjang, dipulihkan, atau diterbitkan ulang	32
Smelter Nikel dan Baja di Sorong?	34
Legalitas Penambangan di Kepulauan Kecil yang Dipertanyakan	35
Penolakan Masyarakat Lokal terhadap Izin Pertambangan	37
Ke mana perginya nikel dari Raja Ampat?	38
Tuntutan	40
Catatan Metodologi	42

Ringkasan



■ Pemandangan Pulau Wayag, Raja Ampat, dari udara yang memperlihatkan panorama menakjubkan laguna biru kehijauan di tengah-tengah formasi batu kapur karst yang menjulang tinggi (27/08/2024). © Sumaryanto Bronto/Greenpeace

Raja Ampat terkenal dengan pulau-pulaunya yang tropis, perairan yang kaya akan kehidupan laut, formasi karst dan hutan yang masih asri. Kawasan ini telah menjadi destinasi impian bagi para wisatawan Indonesia serta penyelam dari seluruh dunia. National Geographic dan The New York Times telah memasukkan Raja Ampat dalam daftar destinasi teratas untuk tahun 2025,¹ sementara CNN Travel menyebutnya sebagai ‘Surga Terakhir di Bumi’². Di dalam negeri, Raja Ampat dijuluki sebagai ‘destinasi wisata unggulan dan terfavorit Indonesia’³ dan pemandangan dari salah satu lokasi terkenalnya, Piaynemo, bahkan diabadikan pada uang kertas seratus ribu rupiah Indonesia. Sementara itu, menurut para pakar konservasi, Kepulauan Raja Ampat dan pesisir Pulau Papua merupakan ‘jantung segitiga terumbu karang’⁴ dan dianggap sebagai ‘pusat keanekaragaman hayati laut’.⁵

- 1 <https://www.nationalgeographic.com/travel/slideshow/best-of-the-world-2025> dan <https://www.nytimes.com/interactive/2025/travel/places-to-travel-destinations-2025.html>
- 2 <https://edition.cnn.com/travel/article/raja-ampat-indonesia-cmd/index.html>
- 3 <https://rajaampatgeopark.com/2021/12/26/piaynemo-favorit-sosmed/>
- 4 <https://rajaampatgeopark.com/our-heritage/bioheritage/>
- 5 <https://www.conservation.org/places/birds-head-seascape>



Pemandangan
bawah laut
di Batu Rufus,
Piaynemo,
Raja Ampat
(29/08/2024).
© Alif R
Nouddy
Korua/
Greenpeace

Raja Ampat juga menjadi rumah bagi komunitas masyarakat adat Papua yang telah hidup di kawasan ini selama beberapa generasi. Komunitas ini hidup selaras dengan adat dan tradisi mereka yang sangat erat hubungannya dengan ekosistem laut dan hutan pesisir di wilayah ini. Kristian Thebu, Ketua Dewan Adat Suku Maya yang mewakili salah satu komunitas pertama yang mendiami Raja Ampat, pernah berkata *“Hutan adalah ibu kami, yang harus kami rawat dan jaga, agar ia terus memberikan kehidupan dari generasi ke generasi. Laut kami hormati seperti ayah kami. Ia memberikan berkah yang melimpah untuk kehidupan terus-menerus sampai Tuhan datang.”*⁶

Seiring dengan meningkatnya popularitas Raja Ampat, meningkat pula berbagai ancaman terhadap masa depannya. Pertumbuhan pariwisata telah memunculkan tantangan besar, terutama karena belum adanya sistem pengelolaan sampah dan limbah yang memadai. Pada akhir 2024, terjadi peristiwa pemutihan karang yang parah, yang menurut dugaan para peneliti dapat disebabkan oleh faktor-faktor seperti pemanasan laut dan buruknya pengelolaan limbah. Peristiwa ini telah berdampak signifikan pada terumbu karang di wilayah Raja Ampat bagian tengah.

Kini muncul ancaman baru, seiring dengan ekspansi industri pertambangan nikel di wilayah ini yang membawa risiko besar terhadap lingkungan, mata

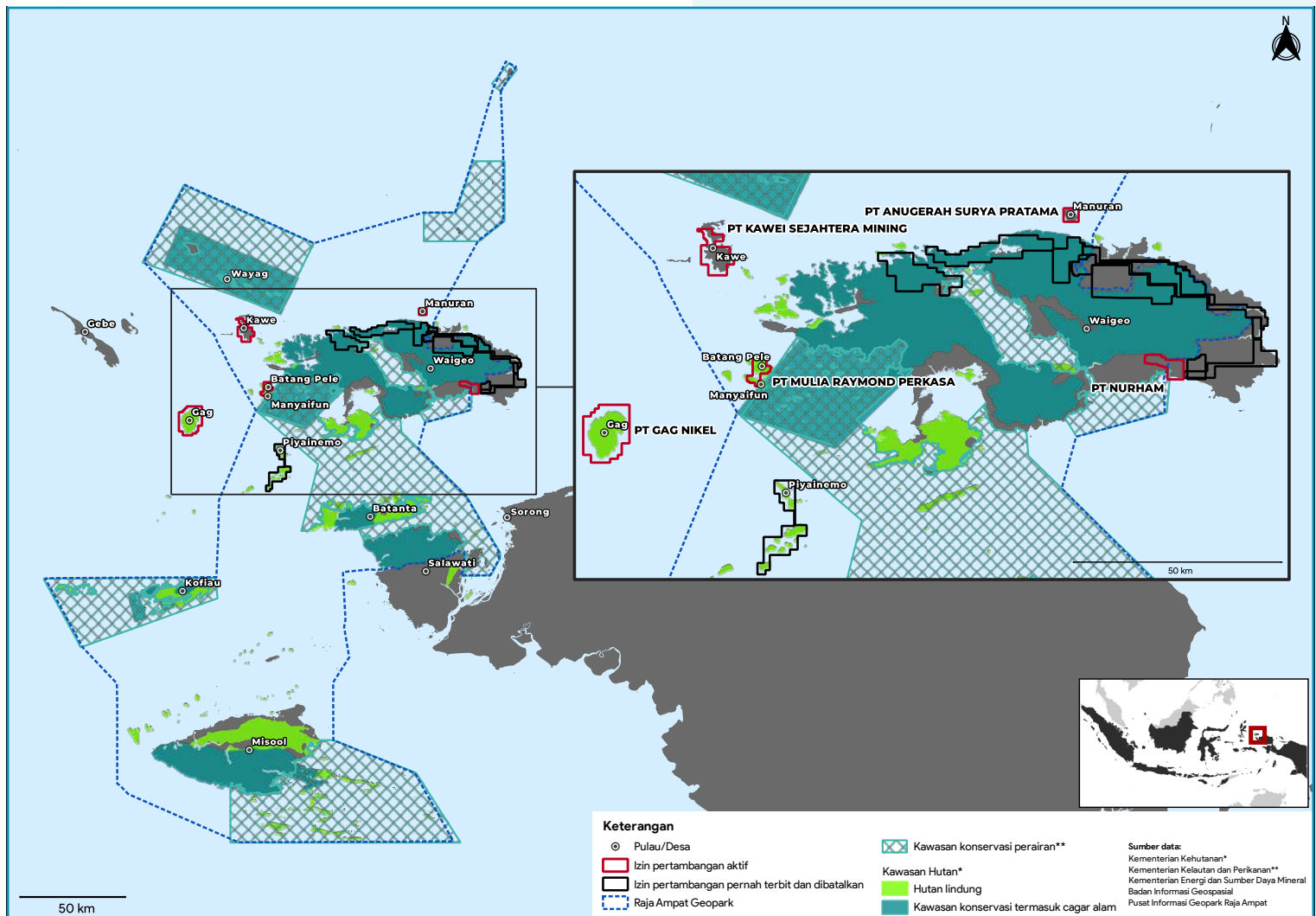
pencarian masyarakat setempat, dan masa depan Raja Ampat sebagai destinasi wisata. Aktivitas pertambangan nikel berisiko menyebabkan kerusakan yang tidak dapat dipulihkan pada terumbu karang dan habitat daratan melalui deforestasi, sedimentasi, dan polusi. Terlepas dari gugatan pemerintah terhadap izin operasinya, perusahaan pertambangan nikel PT Mulia Raymond Perkasa (MRP) baru-baru ini telah mendirikan kamp operasi di Batang Pele. Lokasi ini berdekatan dengan penginapan untuk wisatawan (*homestay*), destinasi wisata yang menarik, dan situs penyelaman penting di Raja Ampat. Empat perusahaan lain juga memiliki izin aktif untuk menambang nikel di Raja Ampat.

Empat dari lima izin yang aktif tersebut berada di dalam kawasan Raja Ampat UNESCO Global Geopark,⁷ sebuah wilayah yang telah dipromosikan untuk konservasi dan pariwisata. Dampak pertambangan sudah terlihat di beberapa lokasi. Hutan telah dirusak dan limpasan air hujan kini membawa sedimen dari daerah yang telah dibuka. Hal ini menyebabkan peningkatan kekeruhan di laut yang menutupi terumbu karang, terlihat dari perubahan warna air di dekat dermaga dan area pertambangan. Analisis Greenpeace terhadap data pemerintah Indonesia dan putusan pengadilan menunjukkan bahwa tiga perusahaan tambahan sedang menempuh jalur hukum untuk mengaktifkan kembali izin yang sebelumnya telah dicabut, dan sejumlah izin lainnya juga mungkin akan diaktifkan kembali.

6 <https://www.antaranews.com/berita/695009/artikel-hutan-adalah-mama-kita-laut-seperti-ayah-kita>
7 <https://www.unesco.org/en/igpp/geoparks/raja-ampat>

Berdasarkan data pemerintah Indonesia, Greenpeace telah memetakan lokasi semua izin di Raja Ampat dan menemukan lima izin aktif serta 11 izin yang pernah diterbitkan namun telah dicabut, sehingga saat ini terdapat total 16 izin, baik yang masih aktif maupun yang pernah berlaku di seluruh kepulauan ini. Dari jumlah tersebut, 12 di antaranya berada di dalam kawasan Geopark. Lebih dari setengahnya terletak di dalam atau pernah berada di kawasan lindung menurut klasifikasi lahan pemerintah Indonesia (meskipun perlu dicatat bahwa perusahaan dalam beberapa kasus masih dapat secara legal mengakses lahan tersebut). Yang mengagetkan, salah satu lokasi paling terkenal di Raja Ampat, Piaynemo—yang juga dikenal sebagai ‘Tangga Jokowi’ setelah didaki oleh Presiden Joko ‘Jokowi’ Widodo kala itu,⁸ termasuk di antara area yang pernah diberikan izin pertambangan nikel.

Bijih nikel dari Raja Ampat diproses oleh pabrik peleburan yang berlokasi di Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) di Maluku Utara. Kawasan industri ini memasok produsen baja nirkarat dan komponen baterai kendaraan listrik, juga pembeli lainnya.



Peta 1: Sebaran izin pertambangan nikel aktif dan pernah diterbitkan yang berada di kawasan konservasi dan hutan lindung Raja Ampat.



■ Seekor burung cendrawasih merah (*Paradisaea rubra*), Raja Ampat (29/08/2024). © Jurnasyanto Sukarno/Greenpeace

Pentingnya Raja Ampat

Raja Ampat adalah sebuah kepulauan yang terletak di provinsi baru Indonesia, Papua Barat Daya, yang berada di lepas pantai Pulau Papua. Daerah ini terkenal akan keanekaragaman hayatinya, baik di darat maupun di laut, dengan beragam jenis laut dan darat, banyak di antaranya bersifat endemik. Raja Ampat terkenal karena banyaknya jenis hewan seperti pari manta, hiu, dan penyu yang dapat ditemukan di wilayah ini dalam jumlah besar, sehingga kerap disebut sebagai ‘mahkota permata’ (*the crown jewels*)’ atau ‘jantung dari segitiga karang’ (*the heart of the coral triangle*),⁹ yaitu wilayah geografis yang menjadi rumah bagi 75% jenis karang dunia dan sekitar 2.500 jenis ikan.¹⁰ Sementara itu, di daratan, menurut situs web Geopark Raja Ampat, terdapat 47 jenis mamalia (satu di antaranya endemik, yaitu kuskus Waigeo) dan 274 jenis burung, dengan 6 jenis yang bersifat endemik.¹¹

⁹ Lihat contoh <https://kkprajaampat.com/en/> dan <https://www.soulscubadivers.com/post/raja-ampat-s-coral-symphony-exploring-the-heart-of-the-coral-triangle>

¹⁰ <http://oceanexplorer.noaa.gov/oceanos/explorations/10index/background/biodiversity/biodiversity.html>

¹¹ <https://rajaampatgeopark.com/our-heritage/bioheritage/>

Pentingnya keanekaragaman hayati Raja Ampat telah diakui oleh pemerintah Indonesia, yang telah mengupayakan pengakuan internasional bagi wilayah ini. Sebagian besar kawasan Kepulauan Raja Ampat telah ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark pada 2023.¹² Global Geopark adalah Global Geopark adalah “*situs dan lanskap dengan signifikansi geologi internasional [yang] dikelola melalui konsep holistik perlindungan, pendidikan, dan pembangunan berkelanjutan.*”¹³ Sepanjang 2024, banyak media Indonesia melaporkan bahwa pihak berwenang juga sedang dalam proses mengajukan Raja Ampat sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO.¹⁴

Sebagian besar wilayah Raja Ampat, baik daratan maupun lautannya, juga telah mendapat beberapa tingkat perlindungan dari pemerintah nasional. Menurut situs web Geopark Raja Ampat, “66% wilayah daratan Raja Ampat merupakan cagar alam... dengan 7 kawasan konservasi darat yang mencakup area seluas 399.564 hektare,” sementara untuk laut, terdapat “5 Kawasan Konservasi Perairan Daerah atau KKPD mencakup area seluas 1.125.940 hektare” dan “2 Kawasan Konservasi Perairan Nasional atau KKPN seluas 185.000 hektare.”¹⁵



■ Pemandangan bawah laut di Raja Ampat (22/05/2013)
© Paul Hilton/Greenpeace

12 <https://www.unesco.org/en/igpp/geoparks/raja-ampat>

13 <https://www.unesco.org/en/igpp/geoparks/about?hub=67817>

14 <https://en.antaranews.com/news/327375/indonesia-eyes-unesco-biosphere-reserve-status-for-raja-ampat>

15 <https://rajaampatgeopark.com/our-heritage/bioheritage/>

Penetapan kawasan konservasi ini merupakan hasil dari upaya selama bertahun-tahun dan kolaborasi intensif antara berbagai pemangku kepentingan lokal, regional, nasional, dan internasional. Hal ini telah memunculkan klaim bahwa Raja Ampat menjadi contoh langka dari sebuah kisah sukses konservasi.¹⁶ Tujuan dari upaya ini adalah untuk menggabungkan perlindungan berskala besar dengan pariwisata berkelanjutan berbasis *homestay* skala kecil dan berbasis komunitas, yang dirancang untuk membawa manfaat langsung bagi masyarakat setempat.¹⁷

Kepulauan ini juga telah berulang kali dipromosikan oleh pemerintah Indonesia sebagai destinasi wisata, termasuk melalui kunjungan Presiden Joko Widodo pada masa jabatannya dan keikutsertaan dalam kampanye pariwisata internasional.¹⁸



■ Seorang wisatawan menjelajahi perairan sekitar Pulau Kawe, Distrik Waigeo Barat, Raja Ampat (04/05/25). © Nita/Greenpeace

16 Lihat contoh <https://www.conservation.org/places/birds-head-seascape>

17 <https://www.stayrajaampat.com/about-stay-raja-ampat/>

18 Lihat contoh https://www.instagram.com/wonderfulindonesia/p/DFCt1WBzduK/?hl=en&img_index=1 dan <https://www.liputan6.com/news/read/5712265/jejak-jokowi-saat-menjelajahi-puncak-raja-ampat?page=1>

Jumlah dan Dampak terhadap Pariwisata

Pada 2024, tercatat sebanyak 33.247 orang berkunjung ke Raja Ampat. Menurut data dari Badan Pusat Statistik setempat, angka ini meningkat hampir 68% dibandingkan tahun sebelumnya.¹⁹ Selain lonjakan jumlah wisatawan, pertumbuhan populasi lokal juga terus meningkat.²⁰



Unggahan Instagram dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Raja Ampat (07/02/2025).

Kementerian Pariwisata Indonesia baru-baru ini menyatakan keinginannya untuk makin mempromosikan kepulauan ini agar dapat menarik lebih banyak wisatawan mancanegara, memanfaatkan pengakuan global yang makin meningkat untuk Raja Ampat.²¹ Namun, meskipun ekowisata berbasis lokal memiliki potensi besar untuk melindungi sumber daya alam serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat, perhatian serius perlu diberikan untuk mencegah potensi dampak negatif terhadap keanekaragaman hayati dan mata pencaharian tradisional. Di wilayah terpencil tanpa infrastruktur untuk mengelola limbah dan air limbah buangan,²² terdapat bukti yang kuat menunjukkan pertumbuhan populasi masyarakat yang pesat dapat menyebabkan kerusakan pada terumbu karang dan ekosistem laut di sekitar Raja Ampat.²³ Jumlah sampah plastik, air limbah yang tidak diolah, serta residu dari produk sabun pencuci atau pembersih terus meningkat di laut, baik yang berasal dari kapal pesiar, resor, penginapan, maupun dari masyarakat lokal di kepulauan ini. Para ilmuwan yang meneliti wilayah ini telah menyatakan keprihatinan atas dampak ekologi yang nyata dari polusi air limbah terhadap terumbu karang di Raja Ampat bagian tengah—termasuk pertumbuhan berlebihan sianobakteri beracun²⁴—dan oleh pemutihan karang yang parah pada akhir tahun 2024.²⁵

¹⁹ https://www.instagram.com/bpsrajaampat/p/DFuITsGtBfe/?img_index=3

²⁰ <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/8710d9d3aa0c407/data-2024-jumlah-penduduk-kabupaten-raja-ampat-70-810-jiwa>

²¹ <https://en.antaranews.com/news/342018/indonesia-aims-to-attract-more-foreign-tourist-arrivals-to-raja-ampat>

²² <https://www.stayrajaampat.com/ultimate-raja-ampat-guide/news/don-t-rubbish-raja-ampat/>

²³ <https://oceanographicmagazine.com/features/cyanobacteria-in-raja-ampat/>

²⁴ ibid

²⁵ <https://theseapeople.org/2024/12/18/coral-bleaching-raja-ampat/>

Ecological Indicators of Sewage Pollution on Coral Reefs

Raja Ampat, Dampier Straits, West Papua

Indikator Ekologis Pencemaran Limbah pada Terumbu Karang Raja Ampat, Selat Dampier, Papua Barat Daya



Sponge Overgrowth

Pertumbuhan Berlebih Spons



White Plague Disease

Penyakit Wabah Putih



Black Band Disease

Penyakit Pita Hitam



Macroalgae Overgrowth

Pertumbuhan Makroalga Berlebih



Crown of Thorns Infestations

Serangan Bintang Laut Mahkota Duri



Cyanophyte Overgrowth

Pertumbuhan Berlebih Cyanophyte
(Ganggang Biru-Hijau)

Salindia dari presentasi profesor biologi P D tentang dampak pencemaran limbah di Raja Ampat (2024).

Sementara para pelaku usaha lokal, pegiat konservasi, dan organisasi pariwisata di wilayah ini menyerukan perubahan untuk meningkatkan pengelolaan limbah dan air limbah buangan, ancaman lain juga telah muncul. Ancaman ini berpotensi menghancurkan keanekaragaman hayati, mata pencaharian tradisional, serta pariwisata di wilayah Raja Ampat.

Pertumbuhan dan Dampak Penambangan Nikel di Seluruh Indonesia

Raja Ampat telah mengalami aktivitas penambangan nikel dalam skala terbatas selama beberapa tahun terakhir, namun permintaan global yang makin meningkat terhadap mineral kritis telah menarik minat banyak investor baru untuk terjun ke industri nikel Indonesia. Hal ini mendorong perluasan pesat penambangan dan pengolahan nikel di wilayah Indonesia Timur,²⁶ termasuk desakan untuk membuka area operasi penambangan baru di Raja Ampat.



■ Penambangan nikel di Pulau Kawe, Raja Ampat, (26/02/25). © Greenpeace

26 Lihat contoh <https://www.aseanbriefing.com/news/indonesias-nickel-downstreaming-policy-opportunities-and-challenges-for-investors/> dan <https://www.ft.com/content/0bbbe7c7-12a1-43ba-8bef-c5c546367a0e?utm>

Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia—diperkirakan sekitar 55 juta ton—dan telah menjadi produsen nikel terbesar di dunia, menyumbang 61% dari pasokan nikel global.²⁷ Larangan ekspor bijih nikel yang diberlakukan oleh mantan Presiden Jokowi²⁸ memicu banjir investasi di industri pengolahan nikel dalam negeri, terutama dari perusahaan-perusahaan Tiongkok.²⁹ Industri pengolahan nikel berpusat di dua lokasi utama pemurnian, yaitu Morowali, Sulawesi Tengah dan Teluk Weda, Maluku Utara. Sebagian besar penambangan nikel juga berlangsung di Sulawesi dan Maluku Utara,³⁰ namun izin pertambangan telah menyebar ke wilayah lain di Indonesia bagian timur, termasuk Raja Ampat.

Industri nikel Indonesia memiliki reputasi yang sangat buruk, terutama karena dampaknya terhadap lingkungan, mata pencaharian masyarakat lokal, serta standar keselamatan kerja yang rendah dan dugaan kurangnya penghormatan terhadap hak-hak pekerja.^{31,32}

Dampak lingkungan yang paling terlihat adalah pada hutan hujan tropis yang berada di atas cadangan nikel—dalam beberapa tahun terakhir, industri nikel telah menjadi salah satu penyebab utama deforestasi.³³ Selain itu, industri nikel juga memberikan dampak signifikan terhadap iklim melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga batu bara (PLTU) *captive* untuk memenuhi kebutuhan energi tinggi dari kompleks smelter.³⁴ Menurut laporan Centre for Research on Energy and Clean Air dan Global Energy Monitor, terdapat 117 PLTU mandiri yang beroperasi di Indonesia pada 2023, dengan kapasitas total sebesar 10,8 GW. Sekitar tiga perempat (8,2 GW) dari kapasitas ini didedikasikan untuk industri logam, dengan sebagian besar untuk industri nikel.³⁵

27 <https://www.ft.com/content/0bbbe7c7-12a1-43ba-8bef-c5c546367a0e?utm>

28 <https://www.nortonrosefulbright.com/en-gb/knowledge/publications/b571b094/indonesia-amends-regulation-on-nickel-export-to-boost-production-of-value-added-products>

29 Lihat contoh <https://www.ft.com/content/0bbbe7c7-12a1-43ba-8bef-c5c546367a0e> dan <https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-12-15/chinese-companies-are-flocking-to-indonesia-for-its-nickel>

30 Lihat contoh <https://www.mining-technology.com/marketdata/five-largest-nickel-mines-indonesia/>

31 Lihat contoh [https://www.cell.com/one-earth/fulltext/S2590-3322\(24\)00534-7](https://www.cell.com/one-earth/fulltext/S2590-3322(24)00534-7) dan <https://asiatimes.com/2024/09/indonesia-blood-nickel-risks-too-grave-to-ignore/#>

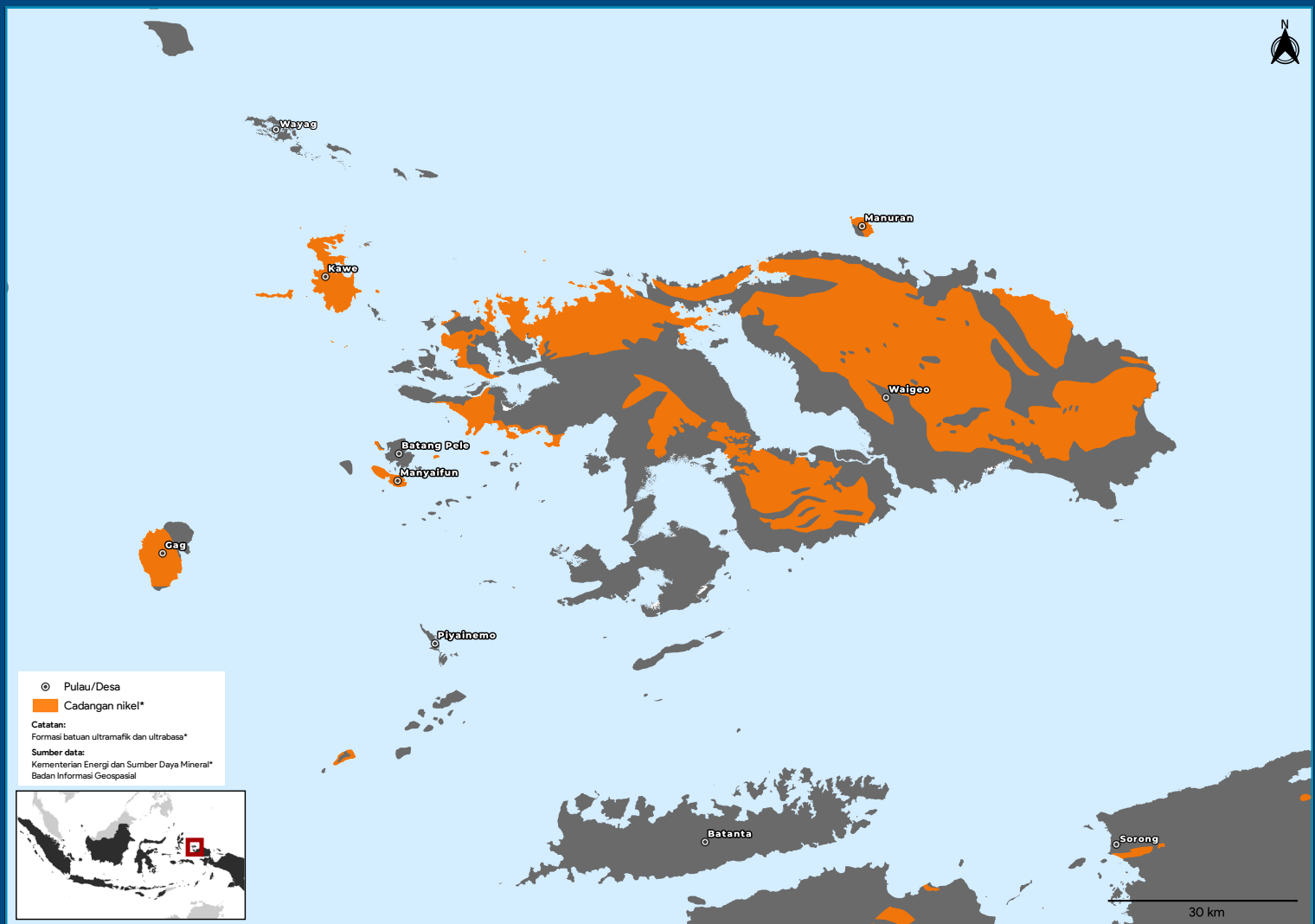
32 <https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/commentary-recurring-nickel-smelter-explosions-in-indonesia-expose-flaws-in-govts-downstreaming-policy-that-prioritizes-economic-gain-over-workers-rights-safety/>

33 <https://news.mongabay.com/2025/02/surge-in-legal-land-clearing-pushes-up-indonesia-deforestation-rate-in-2024/>

34 <https://globalenergymonitor.org/press-release/metal-needed-for-the-renewable-energy-transition-is-processed-using-coal-power-and-indonesia-must-commit-to-a-new-path-forward/>

35 Hal. 5, Emerging Captive Coal Power: Dark Clouds on Indonesia's Clean Energy Horizon https://globalenergymonitor.org/wp-content/uploads/2023/09/CREA_GEM_Indonesia-Captive_2023.pdf

Penambangan Nikel Aktif di Raja Ampat



■ Peta 2: Estimasi cadangan nikel di seluruh Raja Ampat.

Seperti beberapa wilayah lain di Indonesia Timur, cadangan nikel dalam jumlah yang signifikan telah teridentifikasi di Raja Ampat, dengan persebaran di sejumlah pulau termasuk Kawe, Gag, Manuran, Batang Pele, Manyafun, Nawan, dan Waigeo.³⁶

Saat ini terdapat lima izin tambang nikel aktif di Raja Ampat, yang dijelaskan di bawah ini:

36 Hal. 10, Atlas Sumerday Pesisir Raja Ampat, Kabupaten Raja Ampat, 2006 <https://birdsheadseascape.com/download/research/conservation/Atlas%20Sumberdaya%20Pesisir%20Kabupaten%20Raja%20Ampat.pdf>



■ Bukti penambangan nikel di Pulau Gag, Raja Ampat (29/08/24). © Greenpeace

Pulau Manuran



Peta 3. Pulau Manuran.

Pulau Manuran		
	Luas Pulau (ha)	751,07
	Luas konsesi (ha)	1.173
	Deforestasi hingga saat ini (ha)	156 ³⁷
	Diklasifikasikan sebagai Pulau Kecil oleh Pemerintah Indonesia?	Ya
	Berada dalam kawasan UNESCO Global Geopark?	Ya
	Izin di dalam kawasan konservasi atau hutan lindung?	Tidak
	Nama Perusahaan	PT Anugerah Surya Pratama
	Tanggal mulai penambangan	Akhir 2006
	Apakah penambangan sedang berlangsung?	Tidak jelas. Ada aktivitas di lokasi selama 2024 dan 2025, termasuk pembangunan gedung baru dan keberadaan ekskavator.

37 Lihat 'Catatan Metodologi' untuk rincian lengkap sumber data dan analisis yang dilakukan.

Tambang nikel yang paling lama berdiri di Raja Ampat berada di Pulau Manuran, sebelah utara Waigeo, di dalam kawasan UNESCO Global Geopark. Pemegang konsesi adalah PT Anugerah Surya Pratama.

Berdasarkan data profil perusahaan, 60% saham PT Anugerah Surya Pratama dimiliki oleh PT Wanxiang Nickel Indonesia, sedangkan 40% sisanya dimiliki oleh PT Anugerah Surya Mining.³⁸

Penambangan di pulau ini dimulai sejak tahun 2006 tetapi berhenti sekitar tahun 2014. Setelah lama tidak aktif, pada 2024 muncul tanda-tanda aktivitas baru di konsesi ini, yang berlanjut hingga paruh pertama tahun 2025. Aktivitas tersebut meliputi perbaikan jalan dan akomodasi, meskipun laporan dari warga setempat menunjukkan bahwa penambangan itu sendiri belum kembali dimulai.³⁹ Pada 5 Juni 2025, Tempo melaporkan bahwa Kementerian Lingkungan Hidup telah mengambil langkah untuk menghentikan aktivitas ini, dan juga telah mengambil tindakan untuk menanggukkan penambangan lain di Raja Ampat.⁴⁰

Penambangan di Manuran sebelumnya telah memicu protes dari masyarakat setempat.⁴¹ Salah seorang penduduk lokal dikabarkan mengatakan kepada The Sydney Morning Herald dalam investigasi pada tahun 2011, bahwa *“limbah tambang merusak wilayah pesisir dan menutupi terumbu karang.”*⁴²

Analisis citra satelit dari 2024 yang dilakukan oleh Greenpeace mengidentifikasi adanya gumpalan kekeruhan di perairan sekitar Pulau Manuran yang disebabkan oleh limpasan permukaan setelah hujan.⁴³

38 Data kepemilikan diambil dari profil registrasi perusahaan yang dianalisis oleh Greenpeace dari Oktober 2024 hingga April 2025.

39 Peneliti Greenpeace berbicara dengan anggota masyarakat lokal pada Mei 2025.

40 <https://www.tempo.co/lingkungan/breaking-news-klh-segel-4-tambang-nikel-di-raja-ampat-1653175>

41 <https://awasmiffee.potager.org/index.html?p=463&lang=en>

42 <https://www.smh.com.au/environment/sea-of-trouble-20110701-1gv49.html>

43 Citra Planetscope dari 30 November 2024 (Planet)



■ Citra satelit Planet Scope tanggal 13 November 2024 menunjukkan adanya aliran air hujan yang membawa sedimen dari sekitar bekas area tambang di Pulau Manuran, Raja Ampat (30/11/24).



■ Tanda-tanda bekas penambangan di Pulau Manuran, Raja Ampat (27/08/24). © Sumaryanto Bronto/Greenpeace

Pulau Gag



Peta 4. Pulau Gag.

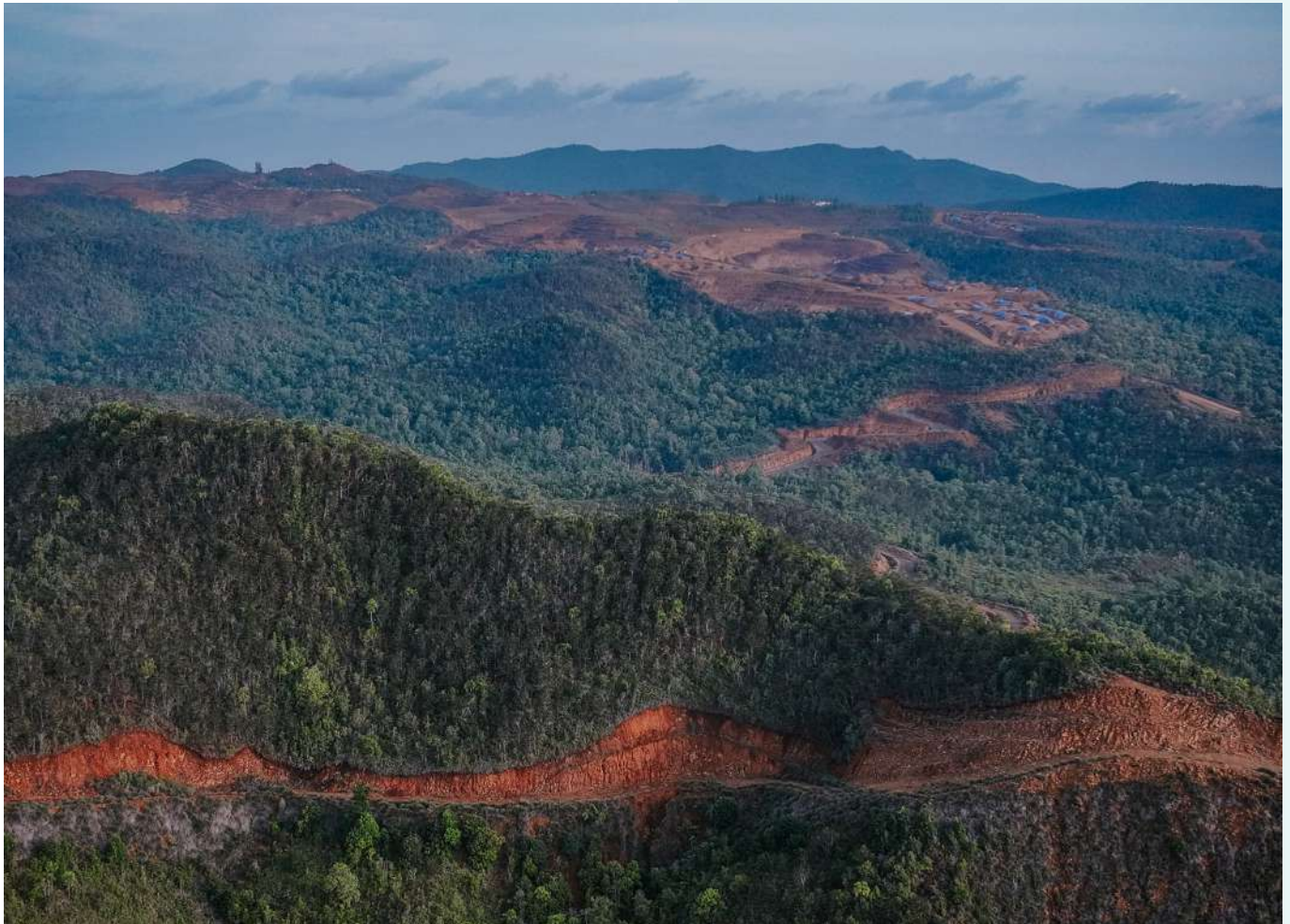
Pulau Gag		
	Luas Pulau (ha)	6.040
	Luas konsesi (ha)	13.126 ⁴⁴
	Deforestasi hingga saat ini (ha)	309 ⁴⁵
	Ditetapkan sebagai Pulau Kecil?	Ya
	Berada dalam UNESCO Global Geopark?	Tidak
	Izin di dalam kawasan konservasi atau hutan lindung?	Ya, kawasan hutan lindung.
	Nama Perusahaan	PT Gag Nickel
	Grup Perusahaan	PT Aneka Tambang
	Tanggal mulai penambangan	Akhir 2017
	Apakah penambangan masih berlangsung?	Ya

44 Area yang berizin lebih besar dari pulau.
45 Lihat 'Catatan Metodologi' untuk rincian lengkap sumber data dan analisis yang dilakukan. PT Gag dalam suratnya kepada Greenpeace tertanggal 10 Juni 2025 menyatakan bahwa dari tahun 2017 hingga Mei 2025 telah membuka lahan seluas 276,5 hektare dan juga telah mereklamasi 136,72 hektare lahan.

Tambang nikel kedua yang mulai beroperasi di Raja Ampat terletak di Pulau Gag. Konsesi pertambangan ini sebelumnya dimiliki oleh BHP Billiton, yang mundur pada tahun 2008 sebelum tambang sempat dikembangkan, menyusul kampanye penolakan terhadap proyek tersebut.⁴⁶ Pemegang konsesi saat ini, PT Gag Nickel, merupakan anak perusahaan dari PT Aneka Tambang Tbk (PT Antam), sebuah perusahaan yang didirikan oleh pemerintah Indonesia. Saham PT Antam tercatat di bursa efek Indonesia dan Australia, dengan pemegang saham mayoritas adalah Pemerintah Indonesia melalui PT Mineral Industri Indonesia (MIND ID), yang 99% sahamnya dimiliki oleh dana kekayaan negara baru Indonesia, Danantara.⁴⁷ Sekitar 35% saham PT Antam dimiliki publik,⁴⁸ termasuk di antaranya Dana Pensiun Pemerintah Norwegia sebagai pemegang saham minoritas.⁴⁹

Pulau Gag terletak di luar batas wilayah UNESCO Global Geopark. Perusahaan mengklaim telah mematuhi seluruh peraturan yang berlaku dan baru-baru ini menyoroti upaya penghijauan kembali di area yang telah ditambang sebelumnya, serta mendukung proyek konservasi penyu di pulau ini.⁵⁰

Saat kunjungan pada Mei 2025, tim Greenpeace menemukan keberadaan kapal tongkang dan kapal tunda yang berlabuh, ekskavator serta sejumlah truk yang lalu-lalang di jalan berbukit yang berkelok. Dari permukaan laut di dekat dermaga milik PT Gag Nickel, pulau ini tampak hijau sekilas, namun rekaman drone dari atas menunjukkan jelas hutan yang dibabat.



 Bukti penambangan nikel di Pulau Gag, Raja Ampat (Mei 2025). © Greenpeace

⁴⁶ <https://www.downtoearth-indonesia.org/story/bhp-billiton-pulls-out-gag-nickel-project-west-papua>

⁴⁷ Profil AHU dari April 2025, MIND ID dimiliki oleh PT Biro Klasifikasi Indonesia yang pada gilirannya 99% dimiliki oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

⁴⁸ <https://antam.com/en/stock-information/ownership-structure-i>

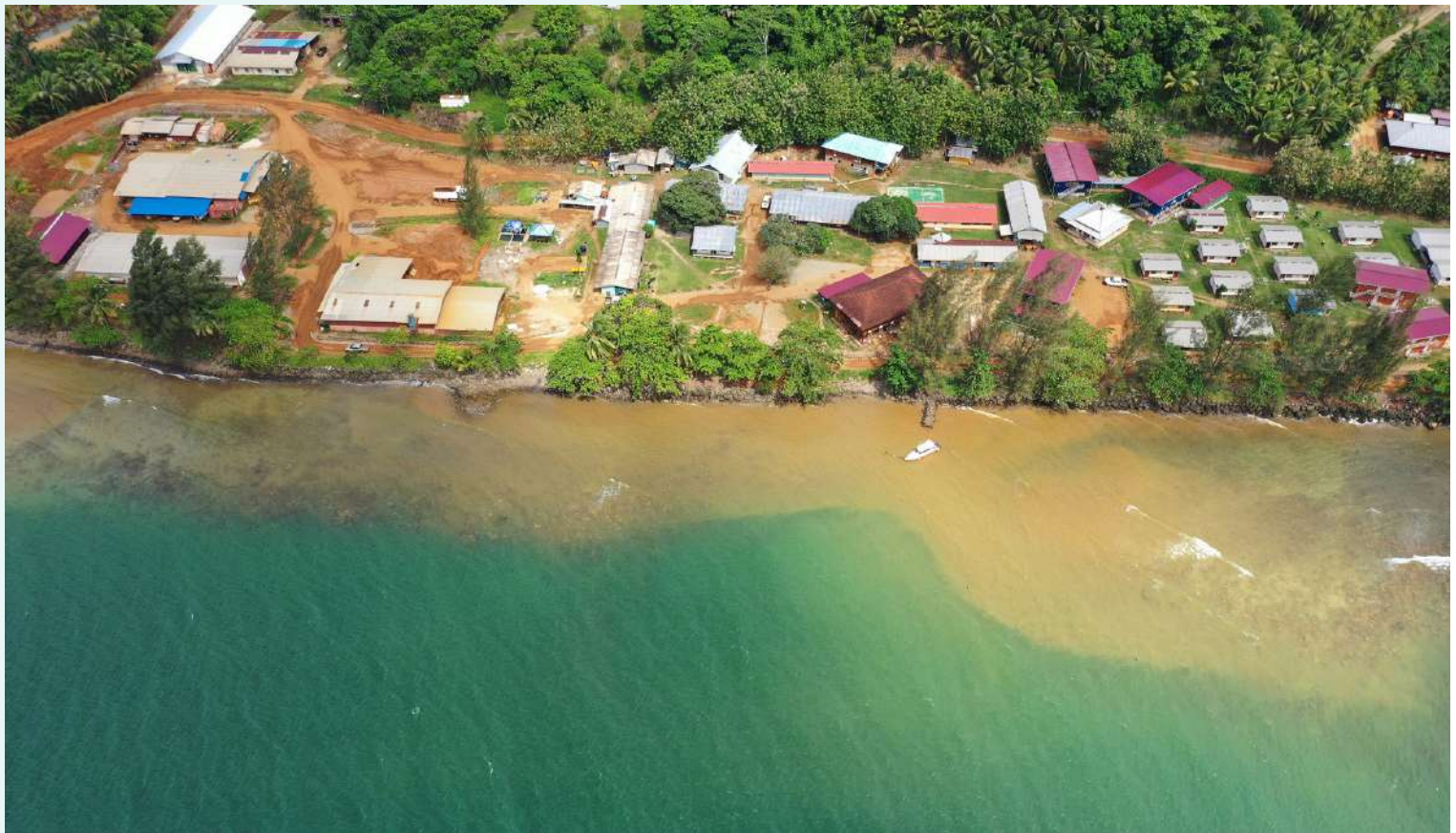
⁴⁹ <https://www.nbim.no/en/investments/all-investments/#/2024/investments/equities/2469/Aneka%20Tambang%20Tbk>

⁵⁰ Lihat contoh <https://jubi.id/lingkungan/2025/pt-gag-nikel-klarifikasi-tuduhan-merusak-lingkungan-di-raja-ampat/>. Isu ini juga disampaikan PT Gag dalam suratnya kepada Greenpeace tertanggal 10 Juni 2025.

Analisis pemetaan yang dilakukan Greenpeace menunjukkan bahwa sejak penambangan nikel dimulai di pulau tersebut, telah terjadi 309 hektare deforestasi hingga saat ini. Artikel Kompas tahun 2022 melaporkan kekhawatiran warga bahwa penambangan nikel juga berdampak terhadap kualitas air dan jumlah ikan di sekitar area tersebut. “Saat hujan turun, air laut berubah menjadi merah,” ujar seorang warga yang diwawancarai.⁵¹

Menyusul tingginya perhatian media terhadap isu pertambangan nikel di Raja Ampat, pada 5 Juni 2025 Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengumumkan bahwa ia telah memerintahkan agar operasi penambangan PT Gag Nickel dihentikan sementara sambil menunggu pemeriksaan lapangan.⁵² Ia lantas melakukan kunjungan singkat ke Pulau Gag pada 7 Juni, sebelum mengumumkan bahwa timnya tak menemukan masalah dan tak melihat bukti adanya sedimentasi di air dekat operasi.⁵³ Secara terpisah, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Hanif Faisol juga mengumumkan penangguhan operasi PT Gag Nickel dan konsesi aktif lainnya di Raja Ampat, dan mengisyaratkan bahwa izin-izin tersebut dapat dibatalkan.⁵⁴ Akan tetapi, tiga hari kemudian Hanif mengatakan bahwa “tingkat pencemaran (di Raja Ampat) yang nampak oleh mata itu hampir tidak terlalu serius”, meskipun ia sendiri belum melakukan pengecekan lapangan.⁵⁵

■ Kawasan pesisir di Pulau Gag yang terlihat jelas perubahan warna air lautnya (06/06/21). © Kompas/ Ferganata Indra Riatmoko



- 51 <https://www.kompas.id/baca/english/2022/02/26/the-irony-of-mining-in-coral-reef-paradise>. PT Gag Nickel dalam suratnya kepada Greenpeace tertanggal 10 Juni 2025 mengatakan bahwa itu telah membangun kolam endapan dan instalasi pengolahan air limbah, dan bahwa air limbah berada di bawah ambang baku mutu yang ditetapkan oleh ketentuan pemerintah.
- 52 <https://www.cnbcindonesia.com/news/20250605151118-4-638905/pengumuman-tambang-nikel-di-raja-ampat-dihentikan-sementara>
- 53 <https://www.dunia-energi.com/kunjungi-pulau-gag-raja-ampat-bahlil-dan-jajarannya-sebut-tidak-temukan-masalah-kegiatan-tambang-pt-gag-nikel/>
- 54 <https://www.tempo.co/lingkungan/breaking-news-klh-segel-4-tambang-nikel-di-raja-ampat-1653175>
- 55 <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250608144232-20-1237649/menteri-lh-klaim-pencemaran-tambang-di-raja-ampat-tak-terlalu-serius>



■ Terumbu karang acropora hampir sepenuhnya hilang di dekat Pulau Gag, Raja Ampat (12/04/25). © Wendy Mitchell/Greenpeace

Orang yang Terpapar Secara Politis (Politically Exposed Persons)

Perusahaan induk PT Gag Nickel, PT Antam, adalah salah satu perusahaan BUMN yang berada di bawah holding MIND ID, yang 99% sahamnya dimiliki oleh Danantara.⁵⁶

Komisaris Utama MIND ID adalah Fuad Bawazier, yang diangkat pada Juni 2024 setelah berperan aktif dalam kampanye pemilihan presiden Prabowo-Gibran sebagai Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN).⁵⁷ Grace Natalie Louisa, juga anggota tim kampanye Prabowo-Gibran, diangkat menjadi komisaris di MIND ID.⁵⁸ Grace merupakan salah satu pendiri Partai Solidaritas Indonesia (PSI),⁵⁹ yang merupakan bagian

dari koalisi pemerintahan Prabowo.⁶⁰ Komisaris MIND ID dilaporkan menerima tunjangan bernilai miliaran rupiah per tahun.⁶¹

Di antara komisaris PT Gag Nickel terdapat Ahmad Fahrur Rozi, salah satu pimpinan Nahdlatul Ulama, yang merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia.⁶² Bambang Sunarwibowo, purnawirawan jenderal polisi dan mantan sekretaris utama Badan Intelijen Negara (BIN), juga merupakan komisaris PT Antam.⁶³

56 Profil AHU dari April 2025, MIND ID dimiliki oleh PT Biro Klasifikasi Indonesia yang pada gilirannya 99% dimiliki oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (DANANTARA)

57 <https://www.antaraneews.com/berita/4146888/mind-id-tunjuk-fuad-bawazier-jadi-komut-grace-natalie-jadi-komisaris>

58 <https://indonesiabusinesspost.com/2131/Politics/corporate-commissioner-posts-for-prabowo-gibran-election-winning-team-members>

59 ibid

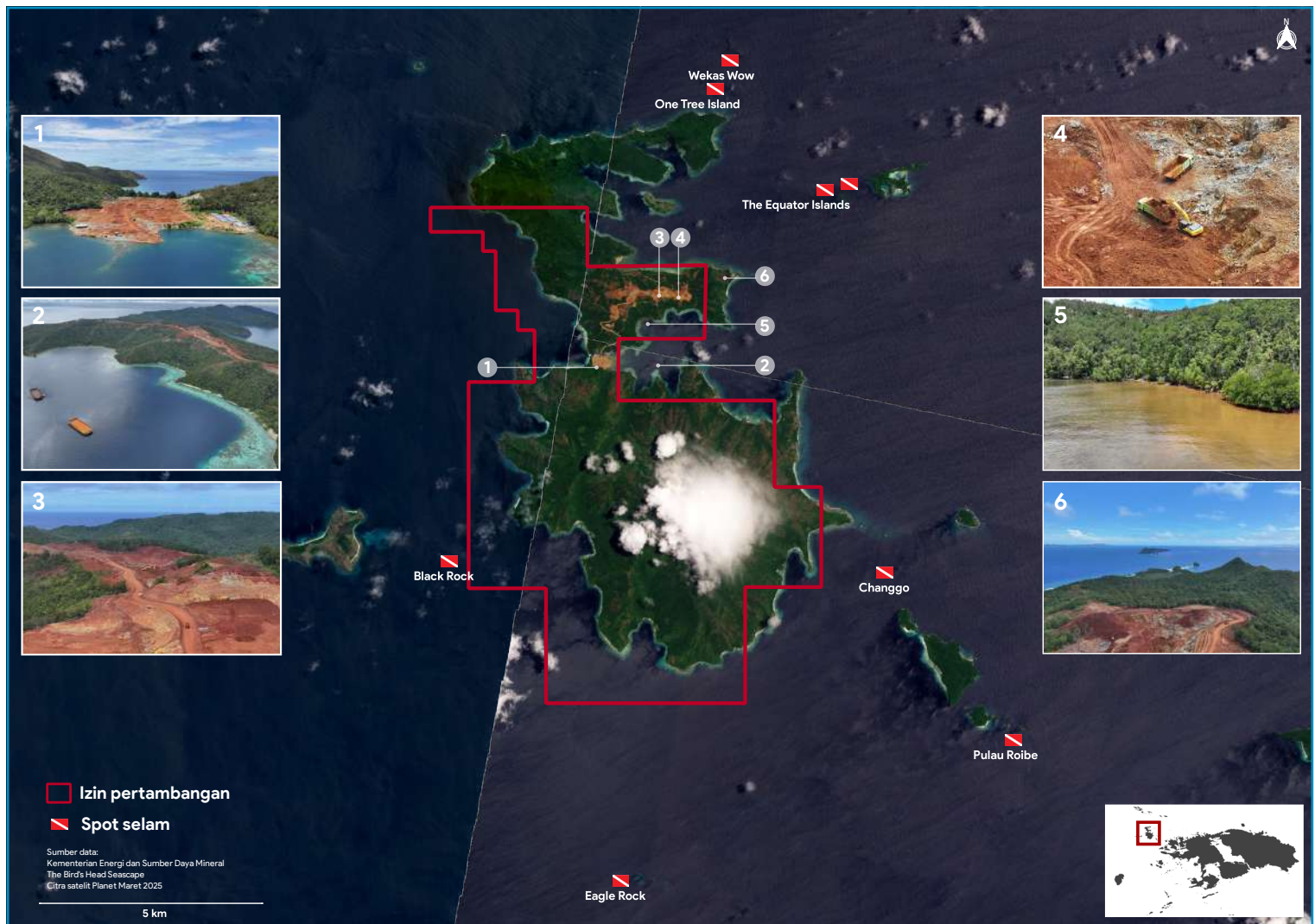
60 <https://www.thejakartapost.com/opinion/2024/10/28/analysis-prabowos-cabinet-too-big-to-fail.html>

61 <https://www.kompas.id/baca/english/2024/06/13/en-intip-gaji-komisaris-ptpn-dan-mine-id-setahun-kantongi-miliaran-rupiah>

62 Informasi dari profil AHU yang dimiliki oleh Greenpeace (2024 dan 2025) tersedia berdasarkan permintaan. Peran di PBNU: <https://www.nu.or.id/nasional/susunan-lengkap-kepengurusan-pbnu-2022-2027-NnLZc>

63 <https://go.kompas.com/read/2020/06/12/085522174/state-owned-enterprises-minister-appoints-intelligence-official-to-pt-antam-board>

Pulau Kawe



■ Peta 5. Pulau Kawe.

Pulau Kawe

	Luas Pulau (ha)	4.561
	Luas konsesi (ha)	5.922 ⁶⁴
	Deforestasi hingga saat ini (ha)	85 ⁶⁵
	Diklasifikasikan sebagai Pulau Kecil?	Ya
	Berada dalam batas UNESCO Global Geopark?	Ya
	Izin di dalam kawasan konservasi atau hutan lindung?	Tidak
	Nama Perusahaan	PT Kawei Sejahtera Mining
	Tanggal mulai penambangan	Penambangan komersial dimulai pada tahun 2008 tetapi segera terhenti. Dimulai kembali pada tahun 2023.
	Apakah saat ini penambangan sedang berlangsung?	Ya

⁶⁴ Luas area yang diberikan izin lebih besar daripada pulau tersebut.

⁶⁵ Lihat 'Catatan Metodologi' untuk rincian lengkap sumber data dan analisis yang dilakukan

Pulau Kawe dikenal luas karena kekayaan keanekaragaman hayati lautnya dan sejumlah lokasi penyelaman populer Raja Ampat, termasuk ‘Black Rock’ dan ‘Equator’. Seorang operator kapal selam Raja Ampat terkemuka menggambarkan Pulau Kawe sebagai “salah

salah satu permata berharga Raja Ampat... ketiadaan perahu, tempat peristirahatan (resort), dan penginapan (homestay) hanya menambah ketenangan pulau-pulau khatulistiwa ini.”⁶⁸



■ Penambangan nikel di Pulau Kawe, Raja Ampat. Dekat dengan pulau kecil di latar belakang adalah situs Equator Dive (26/02/25). © Greenpeace

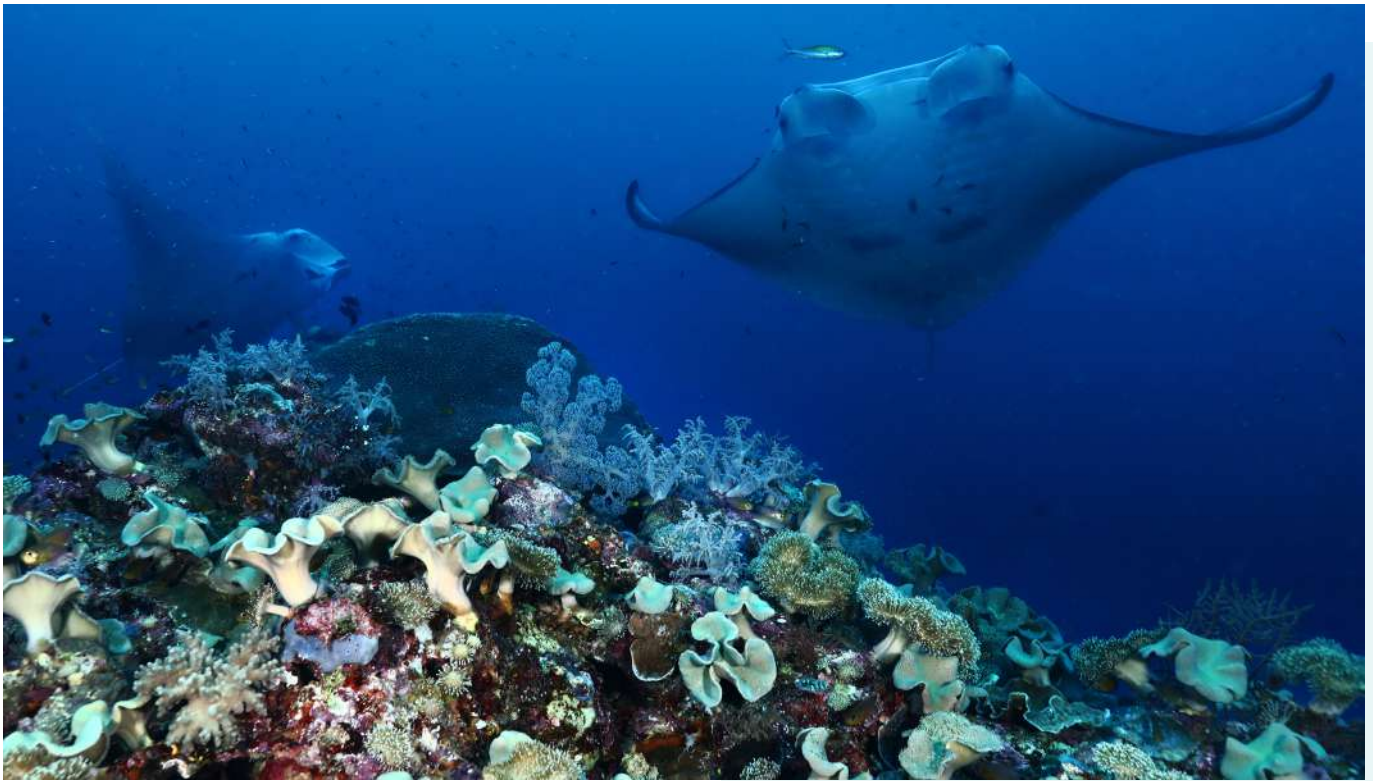
Sebuah studi penelitian jenis pari manta selama lima tahun yang diterbitkan pada 2023 menegaskan pentingnya lokasi Eagle Rock, sebuah area yang dekat dengan lokasi penambangan di Kawe, sebagai “pusat penting dalam jaringan pergerakan pari manta karang Raja Ampat.”⁶⁹ Sebuah blog tahun 2024 dari Konservasi Indonesia/Conservation International menyoroti studi tersebut dan pentingnya Eagle Rock bagi pari manta di kawasan ini. “Kami sudah lama mengamati pari manta yang makan dan membersihkan diri di Eagle Rock, tapi kami tidak tahu betapa pentingnya tempat ini bagi hewan tersebut,” kutipan dari Mark Erdmann, seorang ahli biologi kelautan dari Conservation International dan salah satu penulis studi tersebut. “Kami sangat

khawatir dengan potensi penambangan nikel di dekat Eagle Rock karena dua alasan utama,” ujar Erdmann. “Kawe merupakan pulau pegunungan dengan lereng curam, dengan curah hujan yang sangat tinggi. Jika [perusahaan tambang] mulai melakukan penambangan terbuka di Kawe, setiap kali hujan, akan terjadi aliran lumpur yang langsung masuk ke laut. Dan itu akan menjadi bencana bagi pari manta.” Ia menambahkan, “Kalau lokasi Eagle Rock berhenti berfungsi sebagai tempat utama makan dan pembersihan, kemungkinan besar akan mengubah pola pergerakan pari manta di utara Raja Ampat secara drastis, yang pada akhirnya dapat menurunkan kesehatan populasi pari manta.”⁷⁰

68 <https://www.mermaid-liveboards.com/kawe/>

69 <https://www.conservation.org/press-releases/2024/04/09/new-research-in-raja-ampat-reveals-vital-insights-into-protecting-vulnerable-reef-manta-rays>

70 <https://www.conservation.org/blog/study-mining-could-disrupt-manta-superhighway>



■ Ikan pari manta di Raja Ampat (12/01/20). © Paul Hilton/
Greenpeace

Pada 5 Juni 2025, Tempo melaporkan bahwa Kementerian Lingkungan Hidup telah menanggukuhkan penambangan di Kawe, bersama dengan operasi penambangan aktif lainnya di Raja Ampat.⁷¹

Orang yang Terpapar Secara Politis (Politically Exposed Persons)

Direktur Utama di PT Kawei Sejahtera Mining adalah Freddy Numberi, mantan menteri di bawah pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang pernah menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan serta Menteri Perhubungan. Ia juga pernah menjabat sebagai Gubernur Provinsi Papua dari 1998 hingga 2000.⁷² Ia diduga terkait dengan grup Agung Sedayu melalui PT Inti Agung Makmur, yang dilaporkan oleh media di Indonesia, bahwa grup tersebut memegang sertifikat HGB terkait pembangunan pagar laut sepanjang 30 km yang kontroversial di lepas pantai Tangerang selama tahun 2024.⁷³

Nono Sampono, seorang Letnan Jenderal purnawirawan dari Angkatan Laut Indonesia dan orang yang juga diduga memiliki hubungan dengan grup Agung Sedayu,⁷⁴ juga terlibat dalam struktur kepemilikan perusahaan yang kompleks di balik PT KSM. Saat ini, dia menjabat sebagai Presiden Direktur PT Jaya Bangun Makmur, yang memiliki 30% saham di PT KSM.⁷⁵ Namanya juga dikaitkan dengan kontroversi keberadaan pagar laut di Tangerang, sebagaimana dilaporkan oleh media di Indonesia.⁷⁶ Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dari daerah pemilihan Provinsi Maluku untuk periode 2019-2024.

71 <https://www.tempo.co/lingkungan/breaking-news-klh-segel-4-tambang-nikel-di-raja-ampat-1653175>

72 https://id.wikipedia.org/wiki/Freddy_Numberi

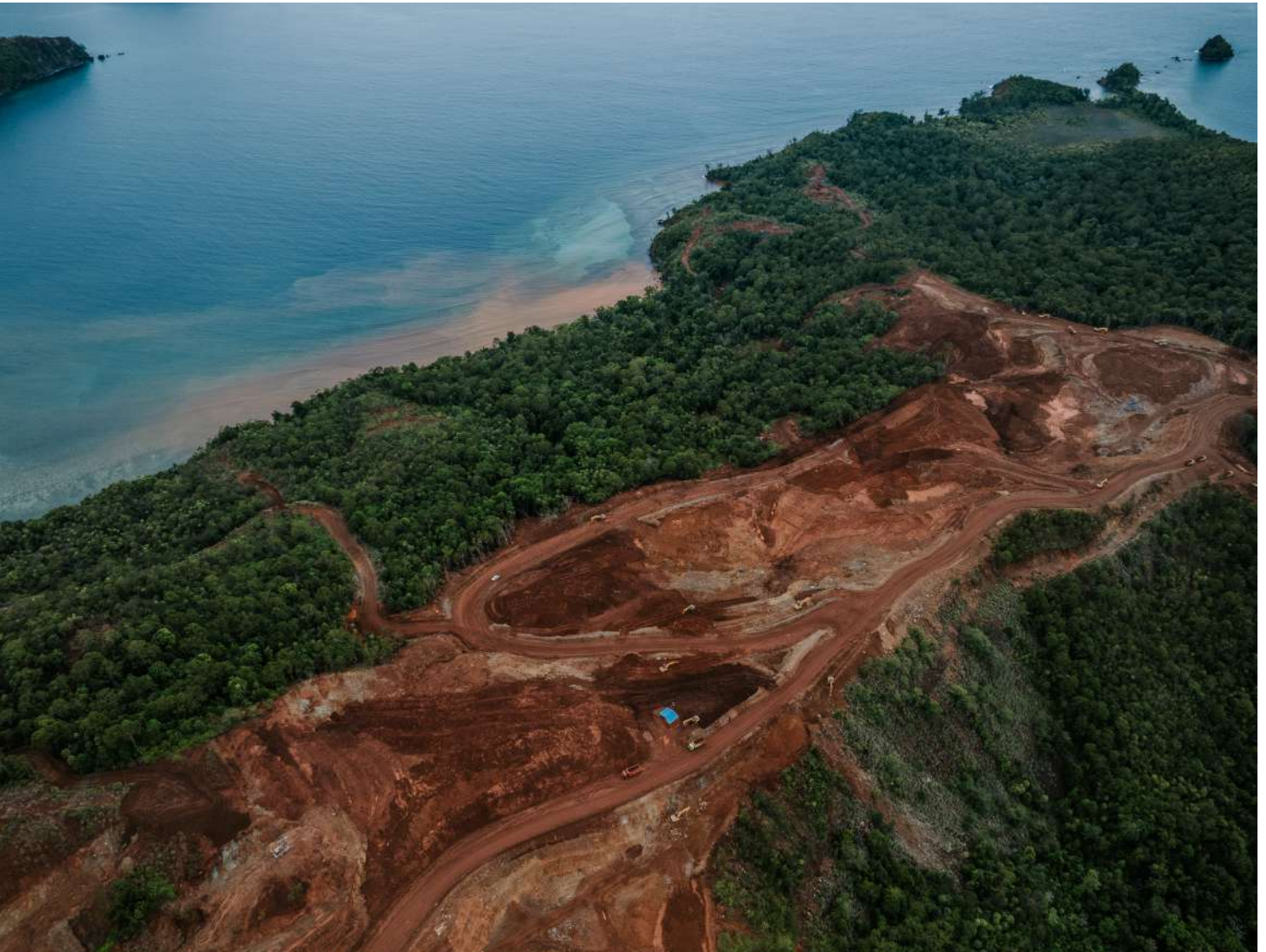
73 Keterkaitannya dengan perusahaan-perusahaan ini dan kaitannya dengan kasus pagar laut di Tangerang telah banyak dilaporkan di beberapa media di Indonesia, lihat misalnya <https://www.democracy.id/2025/01/terkuak-kasus-pagar-laut-mantan-menteri.html> dan <https://www.tempo.co/hukum/sosok-nono-sampono-dan-freddy-numberi-yang-diduga-miliki-sertifikat-hgb-pagar-laut-tangerang-1198509>. Grup Agung Sedayu membantah kepemilikan mereka atas pagar laut - lihat contohnya <https://ekonomi.bisnis.com/read/20250123/47/1834304/terkuak-pt-intan-agung-makmur-pemilik-shgb-di-pagar-laut-terafiliasi-aguan> <https://www.agungsedayu.com/en>

74 Informasi dari profil AHU yang dimiliki Greenpeace dan tersedia atas permintaan

76 Diidentifikasi sebagai Direktur PT Cahaya Inti Sentosa, perusahaan yang memiliki sertifikat bangunan dalam kasus tersebut. <https://www.tempo.co/hukum/sosok-nono-sampono-dan-freddy-numberi-yang-diduga-miliki-sertifikat-hgb-pagar-laut-tangerang-1198509>. Grup Agung Sedayu membantah kepemilikan mereka atas pagar laut - lihat contohnya: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20250123/47/1834304/terkuak-pt-intan-agung-makmur-pemilik-shgb-di-pagar-laut-terafiliasi-aguan>

PT Jaya Bangun Makmur, sebaliknya, dimiliki dengan beberapa lapisan perusahaan lain, baik oleh Sugianto Kusuma (Aguan) dan 5 anggota keluarganya.⁷⁷ Aguan dikenal sebagai pemilik Agung Sedayu Group, yang merupakan salah satu pengembang properti terbesar di Indonesia. Grup tersebut juga terseret dalam kontroversi pagar laut Tangerang, melalui laporan media Indonesia pada awal 2025.⁷⁸

Selain itu, 40% dari saham PT KSM dimiliki oleh PT Dua Delapan Kawei, dan 10% lainnya dimiliki oleh PT Rowan Sukses Investama. Arif Kurniawan merupakan Direktur di kedua perusahaan ini. Arif Kurniawan pernah dimintai keterangan sebagai saksi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus korupsi sektor pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara, di mana seorang mantan bupati diduga menerima suap terkait pemberian izin tambang nikel.⁷⁹



■ Sedimen terlihat jelas di dekat operasi penambangan nikel di Pulau Kawe, Raja Ampat, mengubah warna air di salah satu wilayah laut Indonesia yang paling kaya akan keanekaragaman hayati (04/05/25). © Alif R Noudy Korua/Greenpeace

- 77 Informasi diperoleh oleh Greenpeace dari profil AHU. Rincian lebih lanjut tersedia atas permintaan. Anggota keluarga lainnya adalah Susanto Kusumo (saudara Aguan), Steven Kusumo (keponakan Aguan/anak dari Susanto Kusumo), Alexander Halim Kusuma (anak dari Aguan), Richard Halim Kusuma (anak dari Aguan), dan Luvena Katherine Halim (putri dari Aguan). Koneksi keluarga ini dengan PT Jaya Bangun Makmur melalui kepemilikan perusahaan-perusahaan berikut: PT Cahaya Bintang Sejahtera, PT Catur Kusuma Abadi Sejahtera, PT Alam Pusaka Jaya, PT Agung Sedayu dan PT Sumber Kencana Graha.
- 78 Lihat contoh <https://indonesiasentinel.com/5-key-figures-behind-illegal-sea-fence-tangerang-revealed/> Grup Agung Sedayu membantah kepemilikan mereka atas pagar laut - lihat contohnya: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20250123/47/1834304/terkuak-pt-intan-agung-makmur-pemilik-shgb-di-pagar-laut-terafiliasi-aguan>
- 79 <https://www.antaranews.com/berita/1405526/kpk-panggil-satu-saksi-kasus-izin-pertambangan-konawe-utara>

Pulau Manyafun dan Pulau Batang Pele



Peta 6. Pulau Manyafun dan Batang Pele.

Pulau Manyafun dan Batang Pele		
	Ukuran Pulau (ha)	1.373
	Luas konsesi (ha)	2.193 ⁸⁰
	Deforestasi hingga saat ini (ha)	0
	Diklasifikasikan sebagai Pulau Kecil?	Ya
	Berada dalam batas UNESCO Global Geopark?	Ya
	Izin di dalam kawasan konservasi atau hutan lindung?	Ya, kawasan hutan lindung.
	Nama Perusahaan	PT Mulia Raymond Perkasa
	Apakah pertambangan sedang berlangsung?	Tidak, tetapi <i>base camp</i> sudah dibangun pada Maret 2025.

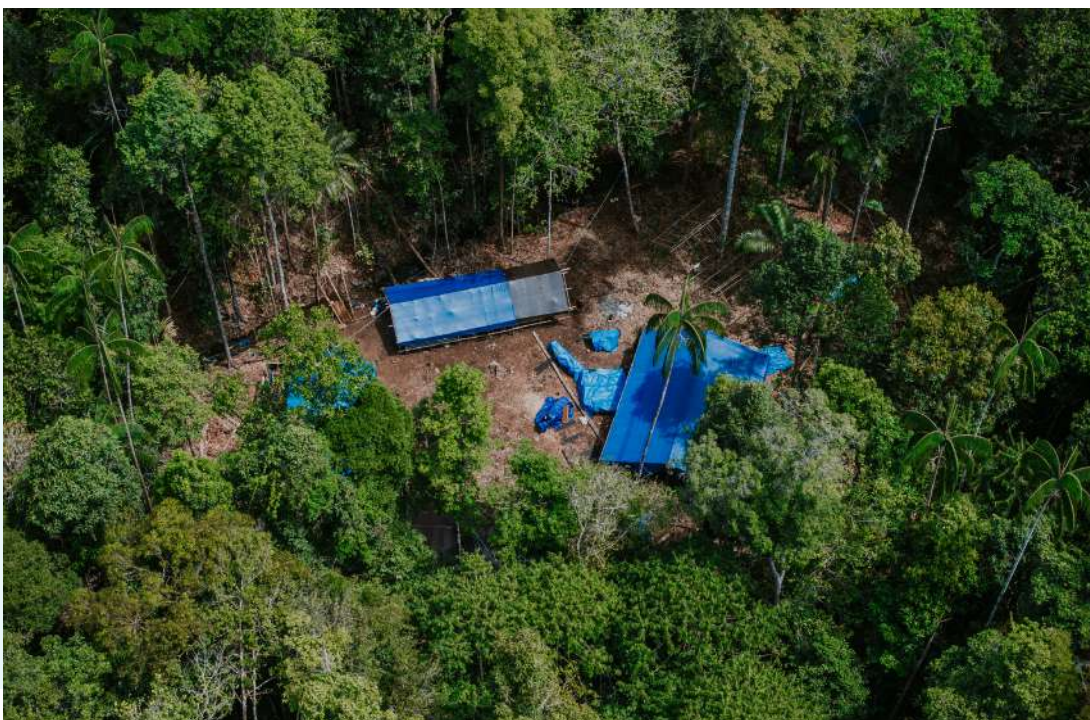
80 Area berlisensi lebih besar dari luasan pulau.



■ Gugusan terumbu karang yang beragam yang berdekatan dengan Batang Pele (11/04/25). © Wendy Mitchell/Greenpeace

Ketika tim Greenpeace mengunjungi Pulau Batang Pele pada Mei 2025, kami menemukan beberapa tenda biru yang didirikan di antara pepohonan lebat. Dengan menggunakan kamera pada drone, tim menemukan sejumlah orang tampak berada di area tersebut, seakan-

akan sedang menjaga lokasi. Di tengah-tengah kamp, tampak tumpukan barang yang ditutup terpal. Material dan orang-orang ini tampaknya sedang bersiap untuk kegiatan pertambangan nikel.



■ Rekaman drone menunjukkan dugaan adanya aktivitas perusahaan tambang di Pulau Batang Pele. Batang Pele adalah tujuan wisata di bagian tengah Raja Ampat (06/05/2025). © Alif R Noudy Korua/Greenpeace

Sebuah izin tambang yang mencakup sebagian besar kedua pulau ini telah diterbitkan kepada PT Mulia Raymond Perkasa (MRP). Pada Maret 2025, warga setempat melaporkan bahwa perusahaan ini telah mendirikan basecamp dan mulai berkomunikasi dengan mereka tentang rencana penambangan, meskipun izin tersebut masih dalam proses hukum di Jakarta. Menurut hasil analisis pemetaan yang dilakukan oleh Greenpeace, kegiatan persiapan eksplorasi tersebut tampaknya berada di kawasan yang diklasifikasikan sebagai kawasan Hutan Lindung oleh Kementerian Kehutanan. Hingga saat ini, PT MRP belum terlihat memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk kawasan tersebut.⁸¹

Seorang pemilik homestay, menangkap ikan dengan cara menyelam dan spearfishing di perairan sekitar Pulau Batang Pele, Raja Ampat (05/05/2025). © Nita/Greenpeace



Izin tambang di wilayah ini sebelumnya dipegang oleh PT Harita Multi Karya Mineral, tetapi kini sudah tidak berlaku lagi. Belum jelas apakah pemegang izin baru, PT MRP, terkait dengan grup Harita. PT MRP menggugat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terkait izin tersebut dan memenangkan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (PTUN), di tingkat banding, dan di Mahkamah Agung.⁸² Kementerian ESDM kini mengajukan permohonan untuk melakukan peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung, dan keputusan terkait PK ini masih dalam proses di saat tulisan ini dibuat.⁸³

Kedua pulau ini terletak di wilayah Raja Ampat yang populer di kalangan wisatawan. Selain terdapat sebuah kampung di sekitar area konsesi, Greenpeace juga mengidentifikasi tujuh penginapan (*homestay*) wisata yang berada di dekat batas konsesi PT MRP.⁸⁴

81 Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Januari 2025. 'Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan' https://geoportal.menlhk.go.id/server/rest/services/jbcdsabhx/PPKH_AR_50K/MapServer Terakhir diakses pada Mei 2025. MRP masih belum memiliki IPPKH.

82 Lihat <https://sipp.ptun-jakarta.go.id/case> nomor perkara 305/G/TF/2023/PTUN.JKT

83 Menurut catatan PTUN Jakarta, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tengah mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung pada 4 Maret 2025 dengan nomor perkara 305/G/TF/2023/PTUN.JKT

84 Analisis pemetaan Greenpeace.

Anggota masyarakat setempat secara aktif berkampanye menolak kehadiran PT MRP di pulau tersebut.⁸⁵ Masyarakat Pulau Manyaifun sering pergi ke Pulau Batang Pele untuk mencari sagu, menangkap lobster dan ikan, serta mengumpulkan bahan bangunan untuk rumah-rumah kecil dan *homestay* yang mereka kelola di Manyaifun. Pada awal Mei 2025, tim Greenpeace bertemu dengan pemilik *homestay*, L, yang tengah menangkap ikan untuk tamu asing yang menginap di penginapan miliknya. Ia menggunakan teknik *freediving* dan *spearfishing*, metode tradisional yang dianggap ramah lingkungan. “Alam menyediakan makanan, air,

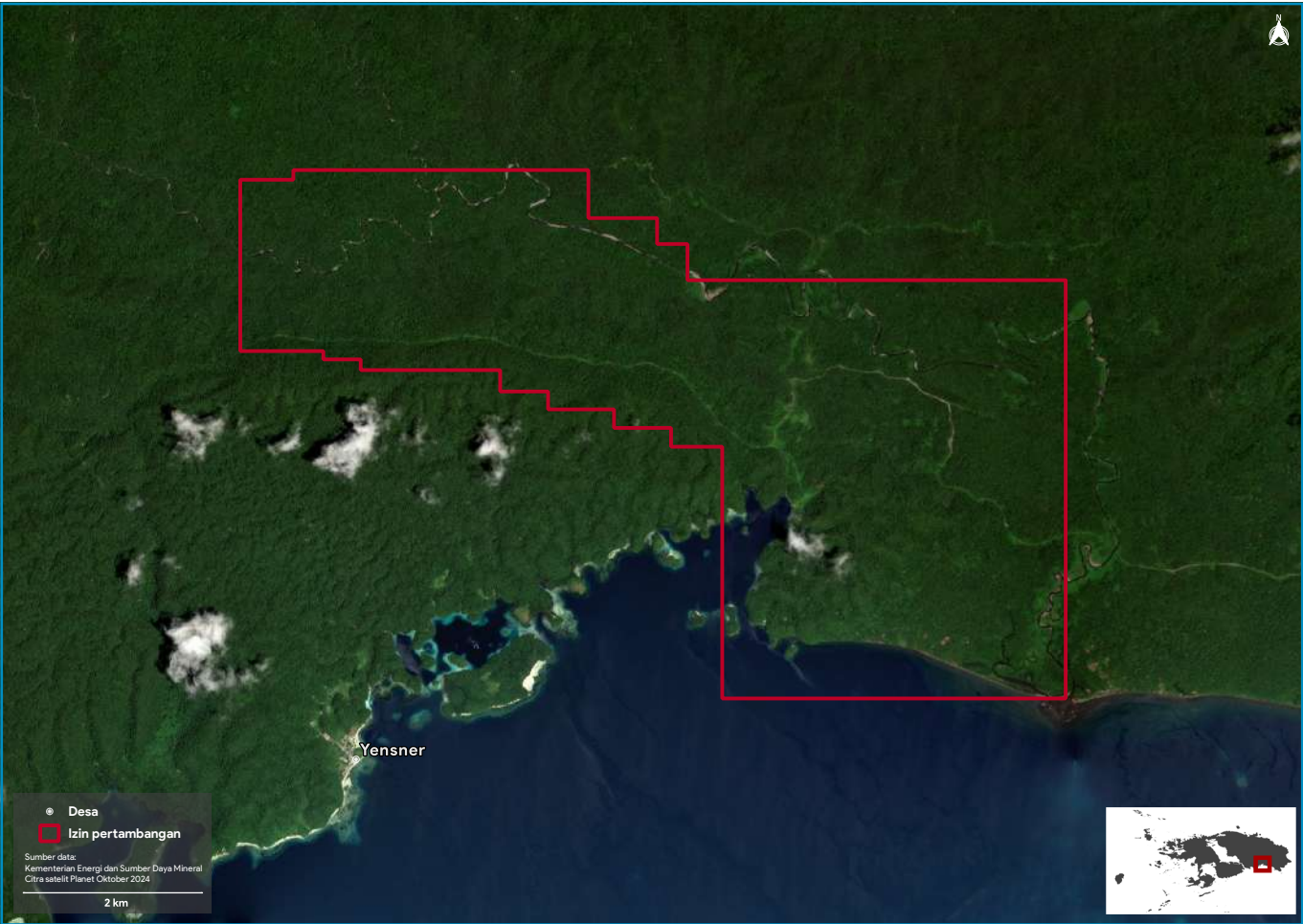
dan oksigen. Kalau ada tambang di Batang Pele, itu sangat mengancam, apalagi saya punya usaha *homestay*,” katanya. Pemilik *homestay* lain, B, menyatakan keyakinannya bahwa perusahaan tambang tidak akan membawa kesejahteraan, tetapi justru membuat masyarakat menderita. “Pemilik *homestay* dari komunitas melindungi hutan dan terumbu karang di sekitar Manyaifun dan Batang Pele. Kami sangat beruntung karena memiliki alam ini dari leluhur kami. Orang tua kami menjaga alam untuk kami, dan kami ingin melindunginya untuk generasi berikutnya.”



■ Terumbu karang dan lamun di tepi perairan Manyaifun (11/04/25). © Wendy Mitchell/Greenpeace

85 <https://teropongnews.com/2025/04/cegah-konflik-antara-warga-masyarakat-kampung-selpele-lakukan-aksi-tolak-pt-mulia-ramond-perkasa/>

Pulau Waigeo (PT Nurham)



■ Peta 7. Bagian dari Pulau Waigeo, dengan garis merah menunjukkan batas konsesi PT Nurham.

Pulau Waigeo - PT Nurham		
	Ukuran Konsesi (ha)	3.000
	Deforestasi hingga saat ini (ha)	0
	Diklasifikasikan sebagai Pulau Kecil?	Tidak
	Berada dalam batas UNESCO Global Geopark?	Ya, setengah dari konsesi berada dalam batas Geopark.
	Izin di dalam kawasan konservasi atau hutan lindung?	Tidak
	Nama Perusahaan	PT Nurham
	Apakah pertambangan sedang berlangsung?	Tidak

Pada kuartal pertama tahun 2025, izin tambang kelima dinyatakan berlaku di Raja Ampat, yaitu di Pulau Waigeo. PT Nurham mendapatkan kembali izinnya setelah berhasil memenangkan proses hukum di Jakarta atas keputusan sebelumnya dari kementerian pertambangan yang telah membatalkan izin tersebut.

Perusahaan tersebut memenangkan gugatan administratif hingga tingkat Mahkamah Agung,⁸⁶ dan tidak ditemukan adanya permohonan untuk proses peninjauan kembali oleh pemerintah pada saat laporan ini disusun. Pada saat laporan ini disusun juga belum terlihat adanya aktivitas pertambangan di konsesi tersebut.

86 <https://sipp.ptun-jakarta.go.id/> nomor perkara 345/G/TF/2023/PTUN.JKT. Nomor perkara Mahkamah Agung 377 K/TUN/2024.

Izin-izin yang telah ditangguhkan, dapat diperpanjang, dipulihkan, atau diterbitkan ulang

Selain izin-izin yang disebutkan di atas, terdapat banyak izin lainnya yang telah diterbitkan kepada perusahaan-perusahaan di Raja Ampat selama hampir 20 tahun. Melalui berbagai perubahan administratif dan serangkaian tinjauan administratif, sebagian besar izin ini telah ditangguhkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM.⁸⁷ Namun, tidak jarang izin-izin yang ditangguhkan ini dipulihkan kembali melalui permohonan perpanjangan izin, proses hukum atau melalui penerbitan izin baru oleh perusahaan lain di area yang sama.

Hingga Mei 2025, selain proses pengadilan yang melibatkan PT Mulia Raymond Perkasa, terdapat juga tiga izin yang dibatalkan dan saat ini sedang disengketakan di pengadilan—izin yang diberikan kepada PT Anugerah Surya Pratama (konsesi di Waigeo), PT Waigeo Mineral Mining dan PT Eka Kurnia Baru.⁸⁸ Laporan audit tahun 2023 tentang sektor nikel oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Papua dan Maluku⁸⁹ mengkategorikan sejumlah izin lainnya pada tahap ‘produksi’ atau ‘operasi’, memberikan indikasi bahwa izin-izin yang sebelumnya dibatalkan ini juga berpotensi diterbitkan kembali.⁹⁰ Tabel berikut memberikan informasi lebih lanjut tentang izin-izin tersebut. Semua izin ini berada di Pulau Waigeo, kecuali satu yang mencakup Kepulauan Fam, termasuk Piaynemo.⁹¹

87 Kementerian pertambangan melakukan proses peninjauan izin pada tahun 2015 yang telah mengarah pada pembatalan ratusan izin pertambangan perusahaan dan pemberian berbagai syarat tambahan yang harus dipenuhi oleh perusahaan untuk mendapatkan status ‘clean and clear’ agar operasional mereka dapat dimulai atau dilanjutkan.

88 Informasi diakses dari situs PTUN <https://sipp.ptun-jakarta.go.id/>. Informasi lebih lanjut disimpan di berkas dan tersedia atas permintaan.

89 <https://www.bpkp.go.id/id/wilayahUnitKerja/maluku-papua>

90 Hal. 4, Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu Atas Tata Kelola Industri Tambang Nikel Tahun 2023, BPKP. Salinan disimpan oleh Greenpeace.

91 Menurut pengakuan beberapa anggota masyarakat lokal yang bertemu dengan peneliti Greenpeace pada Februari 2025, survei awal dilakukan di dalam dan sekitar Kepulauan Fam sekitar satu dekade yang lalu.

 Pulau	 Luas konsesi (ha)	 Nama perusahaan	 Berada dalam batas UNESCO GeoPark?	 Terletak dalam Kawasan Lindung?	 Pertanda Aktivasi Ulang?
Waigeo	9.500	Anugerah Surya Pratama	Sebagian	Ya, Hutan Konservasi (KH)	Proses pengadilan di Jakarta. Muncul dalam laporan audit BPKP 2023.
Waigeo	1.000	Waigeo Mineral Mining	Tidak	Tidak	Proses pengadilan di Jakarta. Muncul dalam laporan audit BPKP 2023.
Waigeo	2.257	Eka Kurnia Baru	Tidak	Tidak	Proses pengadilan di Jakarta.
Kepulauan Fam	8.850	Anugerah Pertiwi Indotama	Ya	Ya, kawasan hutan lindung	Muncul dalam laporan audit BPKP 2023.
Waigeo	4.825	Anugerah Hasta Perkasa	Tidak	Tidak. Hutan Produksi yang dapat dikonversi	Muncul dalam laporan audit BPKP 2023.
Waigeo	2.011	Bumi Waigeo Lestari Jaya	Sebagian	Ya, Hutan Konservasi (KH)	Muncul dalam laporan audit BPKP 2023.
Waigeo	10.000	Alam Bumi Makmur	Sebagian tumpang tindih	Ya, Hutan Konservasi (KH)	Muncul dalam laporan audit BPKP 2023.
Waigeo	10.340	Duta Karya Harita Tambang	Ya	Ya, Hutan Konservasi (KH)	Tidak
Waigeo	10.000	Giri Delta Mining	Ya	Ya, Hutan Konservasi (KH)	Tidak
Waigeo	3.525	Karunia Alam Waigeo	Ya	Ya, Hutan Konservasi (KH)	Tidak
Waigeo	5.292	Pacific Nickel Mining	Ya	Ya, Hutan Konservasi (KH)	Tidak

Smelter Nikel dan Baja di Sorong?



“Ada beberapa aspirasi terkait tambang di Papua, khususnya di Raja Ampat, mereka ingin ada smelternya di sana.”- Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, 3 Juni 2025⁹²

■ Asap tebal mengepul dari cerobong asap yang terlihat dari luar pabrik nikel milik PT IWIP di Weda Tengah, Halmahera Tengah, Maluku Utara (14/08/24). © Mas Agung Wilis Yudha Baskoro/Greenpeace



Pada awal 2024, laporan media menyebutkan bahwa telah tercapai kesepakatan antara pemerintah daerah dan investor yang ingin membangun smelter nikel dan baja di Sorong.⁹³ Proyek ini dijadwalkan akan memulai pembangunan pada Juni tahun itu.⁹⁴ Proyek ini dikabarkan akan dikembangkan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong dan akan didukung oleh dua perusahaan Tiongkok: PT Sheng Wei New Energy Technology, yang akan membangun smelter nikel, dan Beijing Jianlong Heavy Industry Group, yang akan membangun smelter baja.⁹⁵ Pemberitaan sebelumnya

di tahun 2022 juga menyebutkan bahwa PT Gag Nikel secara langsung terlibat.⁹⁶

Sampai dengan Mei 2025, belum ada tanda-tanda dimulainya pekerjaan pembangunan fasilitas, diduga karena menurunnya harga nikel baru-baru ini dan adanya laporan terkait kekurangan bijih nikel di Indonesia.⁹⁷ Namun, detail laporan dalam rencana Sorong tersebut telah menegaskan sejauh mana ancaman dari industri nikel terhadap masa depan Raja Ampat.

⁹² <https://kumparan.com/kumparanbisnis/bahlil-bakal-panggil-pemilik-dan-evaluasi-pertambangan-nikel-di-raja-ampat-25C8eHXcl-ga>
⁹³ <https://indonesiabusinesspost.com/2252/investment-and-risk/chinese-investors-encouraged-to-build-nickel-smelter-steel-plant-in-sorong>
⁹⁴ <https://www.kompas.tv/regional/493734/juni-ini-smelter-nikel-akan-segera-dibangun-di-sorong-papua-barat-daya#>
⁹⁵ <https://asiatoday.id/read/investing-idr-75-trillion-2-chinese-companies-ready-to-build-nickel-and-steel-smelter-in-sorong>
⁹⁶ <https://nikel.co.id/2022/04/22/kepak-sayap-pt-gag-nikel-di-sektor-hulu-dan-hilir-nikel/>
⁹⁷ <https://www.mining.com/web/indonesias-nickel-boom-is-forcing-its-own-smelters-to-shut-down/>

Legalitas Penambangan di Kepulauan Kecil yang Dipertanyakan

Hampir semua izin yang ada, serta izin lainnya yang mungkin akan diterbitkan kembali, berlokasi di dalam batas Geopark Raja Ampat. Meskipun Geopark secara keseluruhan tidak memiliki perlindungan hukum di Indonesia, sebagian besar wilayah di dalamnya, baik di darat maupun laut, telah dilindungi oleh pemerintah nasional melalui langkah-langkah konservasi dari Kementerian Kelautan dan Kementerian Kehutanan. Namun, perlindungan ini tidak selalu berarti wilayah tersebut bebas dari operasi pertambangan komersial.

Banyak dari wilayah penambangan nikel saat ini atau yang mempunyai potensi di Raja Ampat berada dalam kawasan hutan negara (kawasan hutan) telah dikategorikan sebagai ‘hutan konservasi’ oleh Kementerian Kehutanan. Seperti yang ditunjukkan pada peta Raja Ampat (Peta 1), sebagian besar kawasan hutan di pulau-pulau seperti Waigeo ditetapkan sebagai cagar alam (cagar alam - ditunjukkan dengan warna hijau tua) dan wilayah lainnya, termasuk Pulau Manyafun dan Batang Pele, telah ditetapkan sebagai hutan lindung (hutan lindung - ditunjukkan dengan warna hijau muda).

Secara kontroversial, tetap dimungkinkan bagi perusahaan tambang nikel untuk mengajukan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH),⁹⁸ bahkan dalam kawasan cagar alam, yang memungkinkan mereka untuk melakukan operasi pertambangan di wilayah tersebut asalkan melakukan rehabilitasi pasca-tambang. Namun, hutan lindung tetap tertutup untuk pertambangan terbuka (*open cast mining*). Inilah metode yang umumnya digunakan oleh perusahaan tambang

nikel di Indonesia.⁹⁹ Tindakan pengecualian yang juga menuai banyak kritik, telah diberikan kepada PT Gag Nikel, yang izinnya terbit pada tahun 1998 sebelum Undang-Undang Kehutanan Tahun 1999 berlaku serta memperkenalkan aturan ini.¹⁰⁰

Selain pembatasan perizinan yang berlaku untuk kawasan konservasi yang ditetapkan secara resmi, terdapat juga peraturan lain yang seharusnya membatasi aktivitas pertambangan komersial di Raja Ampat. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mendefinisikan ‘pulau kecil’ sebagai pulau dengan luas kurang dari 2.000 kilometer persegi.¹⁰¹ Empat dari lima izin pertambangan yang aktif di Raja Ampat berada di pulau kecil menurut definisi ini. UU 27/2007 secara tegas membatasi operasi tambang, menyatakan bahwa *“dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, setiap orang, baik secara langsung maupun tidak langsung, dilarang melakukan pertambangan mineral di wilayah yang secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitar.”*¹⁰² Berdasarkan ketentuan ini saja, seluruh operasi pertambangan saat ini di Raja Ampat seharusnya dihentikan atas dasar menyebabkan kerusakan lingkungan.

98 Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) memungkinkan beberapa kelas kawasan hutan tertentu untuk digunakan bagi kegiatan non-kehutanan seperti pertambangan. Izin tersebut diterbitkan untuk jangka waktu tertentu dengan syarat tertentu, termasuk rehabilitasi lahan setelah digunakan. Izin ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2016 yang mengubah Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan. Proses IPPKH telah beralih menjadi izin yang namanya hampir serupa, yaitu PPKH (Perizinan Pemanfaatan Kawasan Hutan), yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2021. Proses baru ini juga memungkinkan penggunaan kawasan hutan lindung oleh perusahaan dengan syarat yang sama.

99 Berdasarkan Pasal 38 ayat (4) Undang-Undang Kehutanan No. 41 Tahun 1999, pertambangan terbuka (*open cast mining*) tidak diperbolehkan di hutan lindung. Ini adalah satu-satunya metode pertambangan yang dianggap layak untuk cadangan bijih laterit nikel yang ditemukan di Indonesia bagian timur.

100 Hal ini dilakukan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu No. 1 Tahun 2004) yang memberikan pengecualian kepada 13 perusahaan termasuk PT Gag Nikel. Uji materi di Mahkamah Konstitusi gagal membatalkan pengecualian ini. Izin khusus PT Gag Nikel kembali ditegaskan melalui Keputusan Presiden (Keppres No. 3 Tahun 2023). Hal ini juga dikonfirmasi oleh perusahaan dalam suratnya tertanggal 10 Juni 2025. Surat tersedia berdasarkan permintaan.

101 <https://peraturan.go.id/uu-no-27-tahun-2007> Undang-Undang ini telah diperbarui dua kali, melalui UU No. 1 Tahun 2014 dan UU No. 6 Tahun 2023, tetapi definisinya tetap tidak berubah.

102 Pasal 35, Huruf K, UU No. 27 Tahun 2007.

Namun, UU 27/2007 diterapkan secara berbeda dalam berbagai peraturan turunan dan tidak ditegakkan secara konsisten oleh para pembuat kebijakan serta pejabat yang berwenang. Peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2008 tampaknya bertentangan dengan UU 27/2007, yang menyatakan bahwa pertambangan di pulau kecil diperbolehkan dalam kondisi tertentu.¹⁰³ Sementara itu, peraturan Kementerian Kelautan lainnya, dari tahun 2020, tampak lebih selaras dengan UU 27/2007. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 53 Tahun 2020 telah dirujuk oleh pejabat dari kementerian tersebut dalam surat pada tahun 2022 yang ditujukan kepada Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (pada saat itu) yang menyuarakan keprihatinan terkait salah satu perusahaan tambang di Raja Ampat, PT KSM. Surat tersebut mencatat bahwa *“Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 53 Tahun 2020, kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara merupakan kegiatan yang tidak diizinkan dilakukan di pulau-pulau kecil dengan luas kurang dari 100 km².”* Greenpeace belum melihat adanya balasan dari

Kementerian Kehutanan ataupun tanda-tanda tindak lanjut lebih lanjut dari Kementerian Kelautan terkait hal ini.

Pertanyaan tentang legalitas operasi PT KSM tampaknya tidak pernah muncul dari Penjabat Gubernur Papua Barat Daya ketika ia mengunjungi PT KSM bersama pejabat pemerintah daerah lainnya pada November 2024. Media lokal melaporkan bahwa dalam kunjungan tersebut, pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada perusahaan lebih berfokus pada komitmen CSR dan kebutuhan untuk merekrut staf dari masyarakat lokal serta membawa staf lokal ke posisi manajerial.¹⁰⁴

Pertambangan di pulau-pulau kecil di Indonesia tengah berlangsung di sejumlah lokasi, namun perusahaan tambang besar di Indonesia tampaknya tetap khawatir tentang keberadaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Pada 2023, PT Gema Kreasi Perdana, anak usaha dari Harita Group, menggugat undang-undang tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan tersebut secara tegas ditolak oleh Mahkamah Konstitusi pada Maret 2024.¹⁰⁵



■ Pemandangan Kepulauan Wayag, Raja Ampat dari udara (27/08/24). © Sumaryanto Bronto/Greenpeace

103 Permen Kementerian Kelautan No. 8 Tahun 2008 menyatakan: “Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan untuk antara lain pertambangan, pemukiman, industri, perkebunan, usaha transportasi dan pelabuhan.”

104 <https://sorongraya.inews.id/read/512706/pj-gubernur-tinjau-tambang-nikel-pt-kawei-sejahtera-mining-bahas-komitmen-untuk-pembangunan-daerah>

105 <https://www.tempo.co/hukum/mk-tolak-gugatan-pt-gema-kreasi-perdana-perusahaan-tambang-nikel-di-pulau-wawonii-75047>

Penolakan Masyarakat Lokal terhadap Izin Pertambangan

“Sebagai seorang anak muda dari Manyafun, saya sangat takut. Saya takut bahwa tambang ini akan membawa dampak negatif bagi kami dan kampung-kampung tetangga.”¹⁰⁶

Kekhawatiran yang semakin besar disuarakan oleh anggota masyarakat lokal, pelaku pariwisata, dan para pegiat konservasi tentang perluasan pertambangan nikel di Raja Ampat, yang dipicu oleh kehadiran PT MRP baru-baru ini di wilayah Raja Ampat Tengah. Sekelompok masyarakat lokal telah menyelenggarakan beberapa aksi protes,¹⁰⁷ dan Aliansi Jaga Alam Raja Ampat telah mengajukan petisi kepada para politisi lokal untuk mencegah PT MRP memulai operasi pertambangan.¹⁰⁸

Selain itu, Asosiasi Homestay Lokal Raja Ampat bersama Asosiasi Penyelam Profesional Lokal, cabang daerah dari Himpunan Pramuwisata Indonesia, dan asosiasi pemilik perahu lokal telah menulis surat kepada Menteri Kehutanan Indonesia, kepala daerah, politisi, dan pejabat lainnya pada awal 2025. Mereka meminta agar kegiatan PT MRP dihentikan karena potensi dampak lingkungan.¹⁰⁹ Kekhawatiran tentang dampak pertambangan nikel juga telah disampaikan oleh Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia.¹¹⁰



■ Sejumlah masyarakat adat, aktivis lingkungan, dan pelaku pariwisata yang tergabung dalam Aliansi Jaga Alam Raja Ampat (ALJARA) melakukan aksi di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Raja Ampat (26/05/2025). © Samuel Moifilit/Greenpeace

¹⁰⁶ R, seorang pemuda dari Desa Manyafun yang merupakan bagian dari Aliansi Jaga Alam Raja Ampat, diwawancarai oleh Greenpeace pada Mei 2025.

¹⁰⁷ <https://melanesiatimes.com/2025/03/12/masyarakat-adat-kawei-menolak-keras-aktivitas-tambang-di-batan-pelei-dan-manyaiuin/>

¹⁰⁸ <https://www.rri.co.id/sorong/daerah/1416983/aliansi-jaga-alam-raja-ampat-sampaikan-petisi-tolak-tambang-di-pulau-batangpele>

¹⁰⁹ Surat tertanggal 12 Maret 2025. Salinan terdapat pada dokumen.

¹¹⁰ <https://www.thejakartapost.com/business/2024/11/13/hotel-industry-raises-concern-over-nickel-mine-raja-ampat.html>

Ke mana perginya nikel dari Raja Ampat?



Foto polusi udara di area pabrik PT IWIP di area pabrik di Weda Tengah, Halmahera Tengah, Maluku Utara (13/08/24). © Mas Agung Wilis Yudha Baskoro/ Greenpeace

Bijih nikel dari dua tambang aktif di Raja Ampat, yaitu PT Gag Nikel dan PT KSM, dimuat ke tongkang dan diangkut untuk diproses pada Kawasan Industri Weda Bay (IWIP) di Pulau Halmahera, Maluku Utara. Kawasan industri besar ini menampung berbagai fasilitas pengolahan nikel dan baja nirkarat (*stainless steel*).¹¹¹ Dari sana, nikel masuk ke rantai pasokan untuk produk seperti baja nirkarat dan komponen baterai kendaraan listrik.

Menurut laporan publik dari perusahaan induk PT Gag Nikel, yaitu PT Antam, bijih dari PT Gag Nikel diproses oleh anak perusahaan PT Tsingshan di IWIP.¹¹² Pada Februari 2025, tim riset Greenpeace melacak tongkang yang mengangkut bijih nikel dari PT Gag Nikel ke IWIP.¹¹³

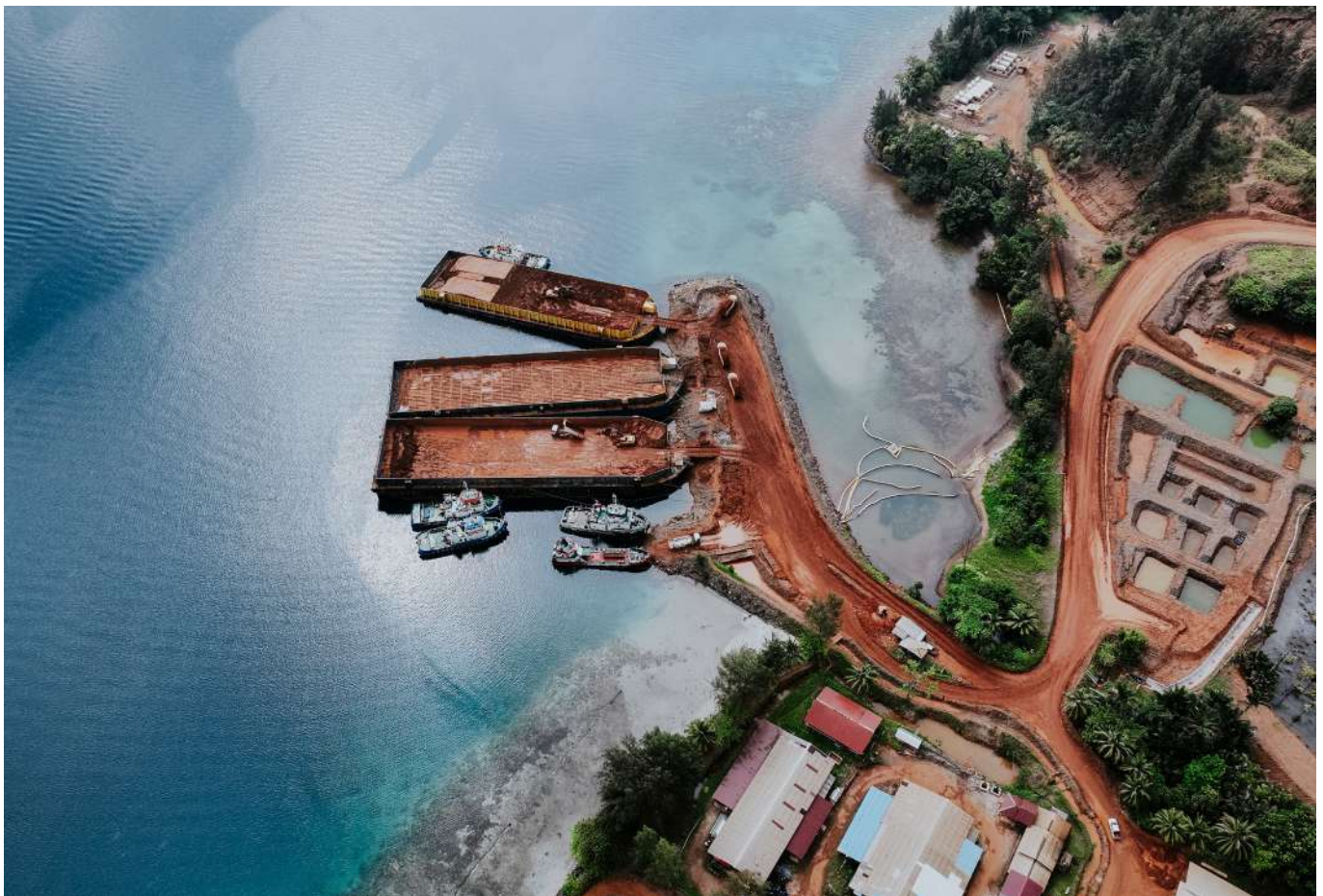
¹¹¹ <https://iwip.co.id/en/home/>

¹¹² <https://www.antam.com/en/news-and-events/article/total-revenue-for-the-nine-months-period-in-2024-increase-40---antam-continues-to-improve-company-performance>

¹¹³ Rincian lebih lanjut tersedia atas permintaan dari Greenpeace.

Menurut dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) PT KSM, bijih nikel yang ditambang di Pulau Kawe awalnya direncanakan akan dikirim ke smelter di Sulawesi.¹¹⁴ Namun, ketika media lokal melaporkan kunjungan Gubernur Provinsi Papua Barat Daya ke PT KSM pada Oktober 2024, dari keterangan staf menyatakan, bahwa bijih nikel diangkut setiap minggu ke Pulau Halmahera, tepatnya ke Teluk Weda, yang lebih dekat dibandingkan ke Sulawesi.¹¹⁵ Pada Februari 2025, tim riset lapangan Greenpeace mendekati awak tongkang yang mengangkut bijih dari PT Kawe dan juga mendapat informasi bahwa bijih tersebut sedang diangkut menuju smelter yang berada di Teluk Weda.

PT Tsingshan adalah salah satu pemegang saham utama di IWIP¹¹⁶ dan juga telah mendirikan perusahaan patungan, Youshan Nickel Indonesia, bersama Grup Huayou.¹¹⁷ Youshan Nickel memproduksi komponen baterai untuk kendaraan listrik di Indonesia. PT Huayou juga memasok nikel ke dalam rantai pasokan baterai yang terkait dengan sejumlah produsen kendaraan listrik utama, termasuk Toyota,¹¹⁸ Honda,^{119,120} Nissan,¹²¹ Hyundai, BMW, Mercedes, Tesla, dan BYD.^{122,123,124} Oleh karena itu, sangat mungkin bahwa salah satu dari rantai pasokan kendaraan tersebut terhubung dengan bijih nikel yang berasal dari Raja Ampat, meskipun kurangnya transparansi pada rantai pasok membuat hal ini belum dapat dipastikan saat ini.



■ Tongkang untuk mengangkut bijih nikel di PT Gag Nickel (01/03/25). © Greenpeace

114 Dokumen AMDAL PT KSM, halaman I-64, salinan arsip.

115 <https://www.rri.co.id/investasi/1086053/pt-kawei-sejahtera-mining-penambang-nikel-raja-ampat-berkomitmen-bayar-pajak>

116 <https://www.etsingshan.com/Col/Col72/Index.aspx>

117 <https://iwip.co.id/en/youshan-nickel-indonesia-company/>

118 Bloomberg Terminal, diakses pada Mei 2025.

119 <https://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-03-16/1219313047.PDF>

120 <https://www.reuters.com/business/autos-transportation/chinas-catl-provide-ev-batteries-honda-starting-2024-2022-12-08/>

121 Bloomberg Terminal, diakses pada Mei 2025.

122 Laporan tidak dipublikasikan yang dimiliki Greenpeace yang memperbarui informasi publik sebelumnya yang mengaitkan rantai pasok nikel dengan produsen kendaraan listrik (EV). Studi sebelumnya yang menunjukkan potensi rantai pasok ini termasuk halaman 24, 'From Forests to EVs' oleh Mighty Earth <https://mightyearth.org/wp-content/uploads/2024/05/FromForeststoEVs.pdf> dan halaman 89-91, 'Nickel Unearthed' oleh Climate Rights International https://cri.org/wp-content/uploads/2024/01/NICKEL_UNEARTHED.pdf

123 Bloomberg Terminal, diakses pada Mei 2025.

124 Huayou telah menyebutkan perusahaan/merek sebagai pelanggan utamanya, <https://huayouindonesia.com/en/global/>

Tuntutan

Pertambangan dan pengolahan nikel telah berkembang pesat di seluruh Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, mengakibatkan kerusakan lingkungan yang parah, perampasan tanah, pelanggaran hak tenaga kerja, serta isu kesehatan dan keselamatan kerja.

Greenpeace percaya pada pendekatan yang holistik dan menyeluruh dalam penambangan dan penggunaan mineral seperti nikel. Permintaan terhadap nikel hasil tambang dapat dikurangi melalui peningkatan efisiensi dan penggunaan bahan pengganti, sementara strategi ekonomi sirkular—seperti daur ulang dan penggunaan kembali—dapat menjadi alternatif yang layak bagi pasokan baru dari tambang. Hal ini, sebagai hasilnya, akan mengurangi tekanan terhadap aktivitas pertambangan, juga menciptakan ruang bagi tata kelola yang lebih baik serta perlindungan lingkungan dan sosial yang lebih kuat.

Dalam jangka pendek, sangat penting untuk menghentikan dan mencegah kegiatan pertambangan di Indonesia pada wilayah-wilayah yang seharusnya sudah dilindungi secara hukum, seperti pulau-pulau kecil atau kawasan konservasi di darat dan laut. Oleh karena itu, semua izin pertambangan nikel di Raja Ampat harus segera dicabut oleh pemerintah Indonesia sebagai langkah yang mendesak, dan tidak memperbolehkan penerbitan izin baru. Rencana pembangunan smelter di Sorong juga harus dibatalkan.

Terdapat pula sejumlah nilai penting yang membuat suatu kawasan harus menjadi area terlarang bagi kegiatan pertambangan. Nilai-nilai tersebut antara lain: Kawasan dengan Nilai Konservasi Tinggi (NKT)¹²⁵ bagi habitat jenis yang terancam atau kawasan dengan Stok Karbon Tinggi (SKT),¹²⁶ sebagai ekosistem alami yang signifikan, dan badan air yang bernilai strategis/kritis. Selain itu, wilayah yang terdapat Masyarakat Adat yang hidup dalam isolasi sukarela,¹²⁷ atau wilayah di mana persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (FPIC) dari Masyarakat Adat dan komunitas lokal (IP&LC) belum diperoleh.

¹²⁵ High Conservation Value Approach

¹²⁶ Kepadatan Biomassa Pohon Hidup di Atas Tanah, <https://data.globalforestwatch.org/datasets/gfw::aboveground-live-woody-biomass-density/about>

¹²⁷ Sebagai contoh, masyarakat Hongana Manyawa di Pulau Halmahera, Indonesia. <https://www.theguardian.com/world/2024/nov/26/uncontacted-hunter-gatherers-facing-threat-of-genocide-because-of-minerals-mining-claims-report>

Jika pemerintah tidak segera mengambil tindakan, maka sangat penting bagi para pelaku yang ada pada rantai pasok, termasuk produsen baterai, untuk menyelidiki rantai pasoknya dan secara jelas serta terbuka untuk menolak pasokan dan bijih nikel yang berasal dari tambang mana pun yang berada di Raja Ampat.

Sangat penting bagi para produsen kendaraan listrik untuk segera memperkuat uji tuntas rantai pasoknya, meningkatkan transparansi, dan memastikan bahwa semua mineral yang dibeli tidak menyebabkan deforestasi atau menghilangkan nilai-nilai alam yang penting, meminimalisasi emisi karbon, serta berasal dari wilayah yang menghormati hak-hak masyarakat lokal dan Masyarakat Adat.

Akhirnya, perusahaan pertambangan dan pengolahan bijih harus bertindak lebih bertanggung jawab, meskipun negara tidak memiliki kemampuan atau kemauan untuk melindungi dan menghormati hak asasi manusia dan lingkungan. Perusahaan harus mematuhi semua hukum lokal, nasional, dan internasional, mencegah kerusakan lingkungan, serta bersikap transparan tentang operasi, keuangan, kepemilikan manfaat, uji tuntas hak asasi manusia dan sosial, serta kegiatan rantai pasoknya. Langkah-langkah ini sangat penting untuk mencegah dampak merugikan dari pertambangan nikel di Indonesia.



■ Aktivis Greenpeace mengamati operasi penambangan nikel di Pulau Kawe, Raja Ampat (27/08/24). © Sumaryanto Bronto/Greenpeace

Catatan Metodologi

Angka-angka deforestasi dalam dokumen ini dihitung oleh Greenpeace berdasarkan sejumlah sumber data dari Kementerian Kehutanan (Indonesia), Kementerian Kelautan dan Perikanan (Indonesia), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Indonesia), Badan Informasi Geospasial (Indonesia), Global Geopark Network, GLAD Lab Universitas Maryland dan Planet Lab.

Deforestasi mengacu pada pembukaan area hutan dan jenis vegetasi alami lainnya, termasuk beberapa jenis endemik di pulau-pulau yang berada di Raja Ampat. Beberapa jenis vegetasi yang terancam oleh operasi dan pembangunan infrastruktur dari pertambangan nikel meliputi vegetasi yang mampu beradaptasi¹²⁸ dengan tanah ultrabasa pada tempat ditemukannya endapan nikel, termasuk hutan ultrabasa,¹²⁹ hutan terbuka ultrabasa,¹³⁰ dan semak ultrabasa.^{131,132} Selain pepohonan dan semak berkayu, ini juga meliputi palem,¹³³ anggrek,¹³⁴ dan padang rumput, yang semuanya itu tidak hanya mencegah erosi yang akan merusak terumbu karang, namun juga menjadi habitat bagi burung dan hewan.

Surat permintaan tanggapan atas temuan laporan telah dikirimkan kepada perusahaan-perusahaan yang memiliki izin pertambangan nikel aktif di Raja Ampat pada saat laporan ini disusun. Namun, hanya PT Gag Nikel yang membalas, dan tanggapan yang relevan telah disertakan dalam catatan kaki di dalam laporan ini. Surat selengkapnya juga tersedia berdasarkan permintaan.

Nama-nama masyarakat telah diganti dengan inisial karena alasan keamanan.



128 A. van der Ent, A.J.M. Baker, M.M.J. van Balgooy, A. Tjoa, [Ultramafic nickel laterites in Indonesia \(Sulawesi, Halmahera\): Mining, nickel hyperaccumulators and opportunities for phytomining](#), 2013

129 R.E. Johnstone, [The birds of Gag Island, Western Papuan islands, Indonesia](#), 2006

130 Ryan Donnelly, Duncan Neville and Dr Peter J. Mous, [Report on a rapid ecological assessment of the Raja Ampat Islands, Papua, Eastern Indonesia](#), 2003

131 Takeuchi, Wayne N [A community-level floristic reconnaissance of the Raja Ampat Islands in New Guinea](#), 2003

132 Webb, Campbell, [Vegetation of the Raja Ampat Islands, Papua, Indonesia](#), 2005

133 Charlie D. Heatubun, [Palms in the Nickel Island: An expedition to Gag Island, Western New Guinea](#) 2014

134 Didik Widyatmoko, [Treasure Of The Four Kings: plant expeditions to the Raja Ampat Islands of West Papua](#), 2013



■ Matahari terbenam di Raja Ampat, Papua Barat (28/08/24). © Sumaryanto Bronto/Greenpeace



■ Aktivis Greenpeace dengan latar belakang formasi pulau karst Piaynemo, Raja Ampat yang ikonik (07/05/25). © Nita/Greenpeace

GREENPEACE

Juni 2025

Diterbitkan oleh Greenpeace Indonesia